



PROFIL KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA **KOTA BLITAR**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Blitar

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PROFIL KKBPK.....	2
1.2.1 TUJUAN UMUM.....	2
1.2.1 TUJUAN KHUSUS.....	2
1.3 LANDASAN HUKUM.....	3
1.4 DAFTAR ISTILAH.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM.....	7
2.1 SEJARAH	7
2.2 KONDISI GEOGRAFIS.....	8
2.3 KONDISI DEMOGRAFIS	8
2.4 POTENSI DAERAH.....	9
BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	12
3.1 KUANTITAS PENDUDUK.....	12
3.1.1 JUMLAH PENDUDUK DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	12
3.1.2 KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN UMUR, JENIS KELAMIN, DAN STATUS MENIKAH	12
3.1.3 JUMLAH WANITA USIA SUBUR	15
3.1.4 PASANGAN USIA SUBUR.....	16
3.1.5 DISTRIBUSI PENDUDUK	17
3.2 INDIKATOR FERTILITAS	19
3.2.1 ANGKA KELAHIRAN KASAR/CRUDE BIRTH RATE (CBR).....	19
3.2.2 USIA KAWIN PERTAMA (UKP).....	20
3.3 INDIKATOR KELUARGA BERENCANA.....	22
3.3.1 PASANGAN USIA SUBUR (PUS).....	22
3.3.2 ANGKA KESERTAAN BER-KB/CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE (CPR).....	23
3.3.3 JUMLAH PESERTA KB BERDASARKAN JENIS ALAT KONTRASEPSI	24
3.3.4 UNMET NEED.....	25

3.4 INDIKATOR KUALITAS PENDUDUK	26
3.4.1 KESEHATAN	26
3.4.1.1 ANGKA KEMATIAN BAYI	26
3.4.1.2 CAKUPAN IMUNISASI LENGKAP	27
3.4.1.3 JUMLAH BAYI DENGAN GIZI BURUK	28
3.4.1.4 JUMLAH PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF	31
3.5 PENDIDIKAN	32
3.5.1 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)	32
3.5.2 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)	34
3.5.3 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH MURNI (APM)	35
3.5.4 PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	36
3.5.5 RATA-RATA LAMA SEKOLAH	37
3.5.6 JUMLAH SEKOLAH, TENAGA PENGAJAR, DAN MURID	38
3.6 KETENAGAKERJAAN	39
3.6.1 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)	39
3.6.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)	40
3.7 DATA PEMBANGUNAN KELUARGA	41
3.7.1 JUMLAH KELUARGA SEJAHTERA DAN KELUARGA PRA SEJAHTERA	41
3.7.1.1 KELUARGA PRA SEJAHTERA	41
3.7.1.2 KELUARGA SEJAHTERA	41
3.7.2 KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)	42
3.7.3 KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)	43
3.7.4 KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)	45
3.7.5 KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	46
3.8 DATA TENAGA PENYULUH KELUARGA BERENCANA	47
3.8.1 PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB)/PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB)	47
3.8.2 PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB PPKBD	48
3.9 KAMPUNG KELUARGA BERENCANA	49
3.10 KAMPUNG KB SEBAGAI WAHANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	50
3.11 SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN	51

BAB IV PENUTUP	53
4.1 KESIMPULAN	53
4.2 SARAN	54

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 TABEL JUMLAH KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA BLITAR	8
TABEL 3.1 JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 2020, 2021 DAN 2022.....	12
TABEL 3.2 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN KOTA BLITAR TAHUN 2019 – 2022.....	13
TABEL 3.3 JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR KOTA BLITAR TAHUN 2022	14
TABEL 3.4 JUMLAH PENDUDUK WANITA USIA SUBUR KOTA BLITAR TAHUN 2022.....	15
TABEL 3.5 JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR PESERTA KB DAN BUKAN PESERTA KB KOTA BLITAR TAHUN 2022	17
TABEL 3.6 DISTRIBUSI PENDUDUK KOTA BLITAR TAHUN 2021 - 2022	18
TABEL 3.7 KEPADATAN PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN MENURUT KECAMATAN DI KOTA BLITAR (PER KM2) TAHUN 2022	19
TABEL 3.8 ANGKA KELAHIRAN BAYI KOTA BLITAR TAHUN 2022.....	19
TABEL 3.9 DATA USIA KAWIN PERTAMA (UKP) KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2022.....	21
TABEL 3.10 PASANGAN USIA SUBUR (PUS) KOTA BLITAR TAHUN 2021-2022	22
TABEL 3.11 ANGKA KESERTAAN BER-KB (CPR) KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2022.....	23
TABEL 3.12 JUMLAH PESERTA KB BERDASARKAN JENIS ALAT KONTRASEPSI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021 – 2022.....	24
TABEL 3.13 UNMET NEED KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2022.....	25
TABEL 3.14 ANGKA KEMATIAN BAYI KOTA BLITAR TAHUN 2018 – 2022.....	27
TABEL 3.15 JUMLAH BAYI YANG MENDAPAT IMUNISASI LENGKAP KOTA BLITAR TAHUN 2022	28
TABEL 3.16 JUMLAH BAYI GIZI BURUK KOTA BLITAR TAHUN 2022.....	30
TABEL 3.17 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan perkembangan kependudukan sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kualitas dan kuantitas penduduk.

Pembangunan kependudukan merupakan isu strategis dan bersifat lintas sektor, sehingga pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan perlu diwujudkan. Upaya-upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.

Berdasarkan arahan kebijakan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu :

1. Pengendalian kuantitas penduduk ditetapkan melalui perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk serta bertujuan agar dapat mewujudkan struktur penduduk tumbuh seimbang (PTS) secara berkelanjutan:
2. Peningkatan kualitas penduduk melalui meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian bayi, meningkatkan kompetensi dan daya kompetisi penduduk melalui pendidikan formal, non formal maupun informal, mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin melalui peningkatan akses perempuan untuk memperoleh Pendidikan, meningkatkan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.
3. Pembangunan Keluarga melalui revitalisasi peran keluarga dalam hal pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik, Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat ekonomi, sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan) serta Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga
4. Penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk melalui menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis, Penyusunan sistem informasi penduduk luar domisili secara terpadu dan transparan, Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para pendatang dan keluarganya, Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung

lingkungan penduduk lokal dengan pendatang serta meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.

5. Penataan Administrasi Kependudukan

Mengembangkan data base kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS) serta penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat

Dalam hal ini, upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan nanti pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk, peningkatan pemahaman serta pengetahuan tentang wawasan kependudukan .

Pembangunan wilayah dilakukan untuk kesejahteraan penduduk wilayah tersebut. Aspek kependudukan secara fungsional membentuk satu kesatuan ekosistem wilayah. Oleh karena itu, informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan kependudukan bermakna pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Peningkatan kualitas penduduk diposisikan sebagai indikator outcome dari semua program kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Profil perkembangan kependudukan menyajikan informasi yang dapat dikaji untuk kepentingan perencanaan pembangunan, pilihan prioritas pagu indikatif pembangunan, rencana tindak penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengembangan model kelembagaan demokrasi.

1.2 Tujuan Penyusunan Profil KKBPK

1.2.1 Tujuan Umum

Memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi dan perkembangan kependudukan sehingga dapat tergali secara tepat permasalahan kependudukan yang diperlukan oleh para perumus kebijakan, pengambil keputusan dan perencana, terutama dalam mengintegrasikan aspek kependudukan dalam pembangunan di segala bidang.

1.2.2 Tujuan Khusus yaitu:

- 1) Mendeskripsikan aspek kuantitas penduduk yaitu jumlah, komposisi dan distribusi penduduk

- 2) Mendeskripsikan aspek yang berkaitan dengan kuantitas penduduk, yaitu fertilitas dan keluarga berencana dan indikator kualitas penduduk seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi ketenagakerjaan, pembangunan keluarga, dsb.

1.3 Landasan Hukum

Latar belakang penyusunan profil KKBPK berdasarkan:

- Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan dan Pembangunan Keluarga
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Huruf N mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

1.4 Daftar Istilah

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk pada kurun waktu tertentu dapat diketahui dengan cara sebagai berikut:

$$P_{t+l} = P_t + (B-D) + (M_i - M_o)$$

Dimana,

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

B = Jumlah kelahiran dari tahun t ke tahun $t+1$

D = Jumlah kematian dari tahun t ke tahun $t+1$

M_i = Jumlah migrasi masuk dari tahun t ke tahun $t+1$

M_o = Jumlah migrasi keluar dari tahun t ke tahun $t+1$

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan rata-rata pertambahan penduduk per tahun pada periode/waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam persen.

$$r = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{P_t}{P_o} \right)$$

Keterangan:

P_t = Jumlah penduduk pada tahun ke- t

P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar

t = jangka waktu

r = laju pertumbuhan penduduk

3. Komposisi Penduduk

Komposisi Penduduk adalah pengelompokan Penduduk berdasarkan ciri- ciri tertentu. Dalam penyusunan profil ini, penduduk dikelompokkan berdasarkan umur dan jenis kelamin.

4. Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin)

Rasio Jenis Kelamin menunjukkan perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya Penduduk laki-laki per 100 jumlah penduduk perempuan dengan rumus sebagai berikut:

$$SR = \frac{L}{P} \times 100$$

5. Fertilitas (Kelahiran)

Fertilitas adalah hasil reproduksi yang nyata dari seorang atau sekelompok wanita, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan.

6. TFR (Total Fertility Rate)

Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total), yaitu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu selama masa reproduksi, yaitu sejak awal usia subur sampai akhir masa reproduksinya

7. ASFR (Age Specific Fertility Rate)

Age Specific Fertility Rate (Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur) yaitu banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu

8. GFR (General Fertility Rate)

General Fertility Rate/Angka Kelahiran Umum merupakan banyaknya kelahiran per 1000 wanita yang berumur 15-49 tahun.

9. CWR (Child Woman Ratio)

Child Woman Ratio/Rasio antara jumlah anak berusia dibawah lima tahun (0-4 tahun) dengan jumlah penduduk perempuan usia reproduksi

10. CBR (Crude Birth Rate)

Crude Birth Rate/Angka Kelahiran Kasar, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1000 penduduk dalam waktu 1 tahun.

$$CBR = B/P \times 1000$$

11. GRR (Gross Reproduction Rate)

Gross Reproduction Rate (Angka Kelahiran Kotor) yaitu rata-rata banyaknya anak perempuan yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduksi, tanpa mempertimbangkan kematian sampai masa reproduksi.

12. CPR (Contraceptive Prevalence Rate)

Persentase pasangan usia subur yg sedang menggunakan kontrasepsi

13. UKP (USIA Kawin Pertama)

Umur pertama kali seorang wanita menikah

14. Mortalitas (Kematian)

UN atau (*United Nations*) dan WHO (*World Health Organization*) membuat definisi „mati sebagai berikut: “Mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.” Pada definisi diatas, terlihat bahwa keadaan “mati” hanya bias terjadi kalau sudah terjadi kelahiran hidup.

15. CDR (Crude Death Rate)

Crude Death Rate/Angka Kematian Kasar adalah besarnya kematian yang terjadi pada suatu periode (tahun) tertentu untuk setiap 1000 penduduk pada tengah tahun yang sama

16. IMR (Infant Mortality Rate)

Angka Kematian Bayi/Infant Mortality Rate, yaitu banyaknya kematian bayi (anak usia kurang satu tahun) pada suatu tahun tertentu per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama

17. AHH (Angka Harapan Hidup)

Angka Harapan Hidup, yaitu rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang

18. In-Migration (Migrasi Masuk)

Migrasi Masuk dikatakan sebagai masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan (*Area of Destination*).

19. Out-Migration (Migrasi Keluar)

Migrasi Keluar didefinisikan sebagai perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal (*Area of Origin*).

20. Net-Migration (Migrasi Neto)

Migrasi Neto merupakan selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila Migrasi yang masuk lebih besar dari pada Migrasi Keluar, maka disebut Migrasi Neto Positif. Sedangkan jika Migrasi Keluar lebih besar dari pada migrasi Masuk, disebut Migrasi Neto Negatif.

21. Persebaran Penduduk

Persebaran Penduduk adalah penggolongan terbesarnya penduduk pada suatu daerah menurut keadaan geografis dan keadaan administratif politisnya.

22. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk merupakan perbandingan antara jumlah Penduduk disuatu wilayah pada tahun tertentu, dibagi dengan luas wilayahnya. Kepadatan Penduduk (*Population Density=PD*) Dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$SR = \frac{P}{W}$$

Dimana,

PD : *Population Density* atau Kepadatan penduduk

P : Jumlah Penduduk pada tahun tertentu

W : Luas wilayah pada tahun tertentu (Km²)

Kepadatan:

$$\text{Tahun 2021} = \frac{143.840}{33} = 4.359 \text{ orang}$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{144.727}{33} = 4.386 \text{ orang}$$

$$\text{Ketergantungan} = \frac{\text{Jumlah penduduk tidak produktif (0-14 + 65 +)}}{\text{Usia 15 - 64 tahun}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2022} &= \frac{30.338 + 13.655}{100.734} = \frac{43.993}{100.734} \times 100 \\ &= 43.67 \% \end{aligned}$$

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah

Berdasarkan legenda, dahulu bangsa Tartar dari Asia Timur sempat menguasai daerah Blitar yang kala itu belum bernama Blitar. Majapahit saat itu merasa perlu untuk merebutnya. Kerajaan adidaya tersebut kemudian mengutus Nilasuwarna untuk memukul mundur bangsa Tartar. Keberuntungan berpihak pada Nilasuwarna, ia dapat mengusir bangsa dari Mongolia itu. Atas jasanya, ia dianugerahi gelar sebagai Adipati Aryo Blitar I untuk kemudian memimpin daerah yang berhasil direbutnya tersebut. Ia menamakan tanah yang berhasil ia bebaskan dengan nama Balitar yang berarti kembali pulang nya bangsa Tartar. Akan tetapi, pada perkembangannya terjadi konflik antara Aryo Blitar I dengan Ki Sengguruh Kinareja yang tak lain adalah patihnya sendiri. Konflik ini terjadi karena Sengguruh ingin mempersunting Dewi Rayung Wulan, istri Aryo Blitar I Singkat cerita, Aryo Blitar I lengser dan Sengguruh meraih tahta dengan gelar Adipati Aryo Blitar II. Akan tetapi, pemberontakan kembali terjadi. Aryo Blitar II dipaksa turun oleh Joko Kandung, putra dari Aryo Blitar I. Kepemimpinan Joko Kandung dihentikan oleh kedatangan bangsa Belanda. Sebenarnya, rakyat Blitar yang multietnis saat itu telah melakukan perlawanan, tetapi dapat diredam oleh Belanda.

Kota Blitar mulai berstatus gemeente (kotapraja) pada tanggal 1 April 1906 berdasarkan peraturan Staatsblad van Nederlandsche Indie No. 150/1906. Pada tahun itu, juga dibentuk beberapa kota lain di Pulau Jawa, antara lain Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Cheribon, Kota Magelang, Samarang, Salatiga, Madioen, Soerabaja, dan Pasoeroean. Dengan statusnya sebagai gemeente, selanjutnya di Blitar juga dibentuk Dewan Kotapradja Blitar yang beranggotakan 13 orang dan mendapatkan subsidi sebesar 11.850 gulden dari Pemerintah Hindia Belanda. Untuk sementara, jabatan burgemeester (wali kota) dirangkap oleh Residen Kediri. Pada zaman pendudukan Jepang, berdasarkan Osamu Seirei tahun 1942, kota ini disebut sebagai Blitar-shi dengan luas wilayah 16,1 km² dan dipimpin oleh seorang shi-chō. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 17/1950, Kota Blitar ditetapkan sebagai daerah kota kecil dengan luas wilayah 16,1 km². Dalam perkembangannya, nama kota ini kemudian diubah lagi menjadi Kotamadya Blitar berdasarkan Undang-Undang No. 18/1965. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48/1982, luas wilayah Kotamadya Blitar ditambah menjadi 32,58 km² serta dikembangkan dari satu menjadi tiga kecamatan dengan dua puluh kelurahan. Terakhir, berdasarkan Undang-Undang No. 22/1999, nama Kotamadya Blitar diubah menjadi Kota Blitar.

2.2 Kondisi Geografis

Kota Blitar terletak antara 112014 BT hingga 112028 BT dan Garis Lintang 802 LS 808 LS berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar dengan luas wilayah 33 Km². Topografi wilayah Kota Blitar secara umum adalah dataran rendah dengan sisi utara lebih tinggi dari selatan. Secara rata-rata ketinggian Kota Blitar dari permukaan air laut sekitar 156 m. Sungai Lahar merupakan satu-satunya sungai yang mengalir di Kota Blitar. Hulu Sungai Lahar berada di gunung Kelud menuju ke sungai Brantas dengan panjang kurang lebih 7,84 km. Jenis tanah Regosol dan Litosol yang ada di Kota Blitar berasal dari gunung Kelud (vulkan). Jenis tanah tersebut mempunyai konsistensi gembur, korositas tinggi dan tahan terhadap erosi. Hal ini menunjukkan tanah di Kota Blitar tergolong subur sehingga memungkinkan berbagai jenis tanaman tumbuh subur.

Secara umum Kota Blitar dibagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sananwetan dan Kecamatan Kepanjenkidul. Masing-masing Kecamatan memiliki 7 Kelurahan. Batas-batas wilayah provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Batas Daerah :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Blitar
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Blitar
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Blitar

Tabel 2.1
Tabel Jumlah Kecamatan dan Kelurahan
Kota Blitar Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	RW
1	SUKOREJO	7	74
2	SANANWETAN	7	50
3	KEPANJENKIDUL	7	64
	JUMLAH	21	188

2.3 Kondisi Demografis

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kota Blitar meningkat, dan mencapai 145.000 jiwa pada tahun 2022 atau mempunyai pertumbuhan penduduk 0,18 persen. Menurut BPS Kota Blitar, dari total penduduk 144.727 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 71.774 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 72.953 jiwa atau mempunyai sex ratio sebesar 98,38. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Pada tahun 2022 kepadatan

penduduk Kota Blitar meningkat 4,48 persen dibanding tahun 2021 atau mencapai 14.040 jiwa per km².

Dalam kurun waktu dua tahun angka ketergantungan penduduk Kota Blitar meningkat. Pada tahun 2021 tercatat 33 dan pada tahun 2022 tercatat 44. Angka 44 di tahun 2022 mengartikan bahwa dari 100 penduduk produktif menanggung usia tidak produktif (usia muda dan usia tua) sebanyak 44 orang. Peningkatan angka ketergantungan menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak produktif yang ditanggung penduduk usia produktif mengalami peningkatan. Diharapkan di tahun 2023 angka ketergantungan bisa diturunkan lagi, karena semakin kecil angka ketergantungan penduduk suatu wilayah maka semakin baik pula kondisi ekonomi suatu wilayah tersebut.

Dengan keberhasilan program keluarga berencana, dengan rata-rata jumlah anak di bawah 3 anak per rumah tangga, dapat diperkirakan ke depan bentuk piramida, lambat laun mulut gentongnya akan mengecil. Untuk sepuluh tahun ke depan, stok penduduk produktif masih tercukupi. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah bonus demografi dari sebaran penduduk.

Penyediaan lapangan usaha untuk penduduk usia produktif harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah. Jangan sampai melimpahnya penduduk usia produktif tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Program pendidikan dan kesehatan juga perlu diperhatikan secara intensif. Untuk membentuk generasi muda yang tangguh, cerdas dan berdaya saing, perlu sejak dini diperhatikan layanan kesehatan dan pendidikan. Program pendidikan dan kesehatan yang baik juga dapat meminimalisir atau bahkan mencegah lahirnya anak-anak stunting, karena pencegahan ini harus dimulaisedini mungkin, yaitu pada masa-masa remaja.

Sementara untuk sebaran usia tua, jumlah penduduk tua wanita jauh lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Kondisi itu menunjukkan angka harapan hidup perempuan lebih panjang dibanding dengan laki-laki. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak hanya difokuskan bagi perempuan yang usia produktif dan muda, tetapi perlu juga dipikirkan untuk pemberdayaan perempuan yang usia lanjut.

2.4 Potensi Daerah

Secara Provinsi Kota Blitar adalah merupakan pemasok pangan yang terbatas sehingga kegiatan pertanian merupakan lapangan usaha yang sangat menentukan dalam struktur perekonomian Kota Blitar. Sektor lapangan usaha lainnya yang juga potensial adalah perdagangan, hotel, restoran, serta sektor industri pengolahan. Struktur kontribusi lapangan usaha yang demikian ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Blitar sudah menampakkan perkembangan kearah kemantapan, yaitu perkembangan industri dan jasa yang didukung oleh pertanian yang tangguh. Kemampuan perekonomian Kota Blitar

yang seperti diuraikan diatas pada hakekatnya memberikan implikasi adanya potensi perkembangan dan pengembangan yang dapat dipacu lebih pesat pada masa - masa mendatang.

Lapangan usaha pertanian di dalam struktur perekonomian Kota Blitar sampai saat ini masih tetap memegang peranan penting, hal tersebut nampak pada sumbangannya terhadap produk regional domestik bruto Kota Blitar. Selain peranannya terhadap struktur perekonomian daerah, Sub - sektor pertanian rakyat juga mampu berperan terhadap stok pangan. Kota Blitar pada tahun mendatang tetap bertekad terus mengupayakan peningkatan produksi pangan dalam rangka pelestarian swasembada pangan sebagaimana yang telah dicapai saat ini.

Nilai ekspor hasil perdagangan Kota Blitar dari tahun ke tahun semakin meningkat, membuktikan bahwa iklim pembangunan dibidang perdagangan Kota Blitar semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dukungan dan terobosan - terobosan di pasaran potensial bagi ekspor migas dan non migas disamping mempertahankan serta terus meningkatkan volume dan nilai eksportnya. Sedangkan untuk koperasi Kota Blitar berupaya mewujudkan Provinsi Koperasi melalui gerakan nasional sadar koperasi serta menciptakan demokrasi ekonomi sampai di tingkat kelurahan.

Dari berbagai potensi pertambangan yang ada di Kota Blitar diharapkan pendapatan dari sektor pertambangan dapat semakin meningkat. Dalam rangka tata ruang, persebaran lokasi bahan tambang perlu diperhatikan dalam usaha pengamanan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu dalam hal pembangunan di bidang energi khususnya tenaga listrik di Kota Blitar menunjukkan peningkatan yang cukup besar.

Kepariwisata di Kota Blitar pada hakekatnya adalah merupakan jasa pemanfaatan sumber alam dan lingkungan hidup yang memiliki kekhususan seperti : budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam.

Potensi obyek wisata yang ada di Kota Blitar meliputi:

- Wisata Makam Bung Karno
- Sumber Udel Water Park
- Agrowisata Blimbing Kelurahan Karang Sari
- Makam Aryo Blitar Kelurahan Blitar
- Green Park Sentul Kelurahan Sentu
- Taman rekreasi Kebon Rojo

Potensi perkembangan kepariwisataan di Kota Blitar dapat digali dan ditingkatkan karena pemanfaatan saat ini maksimal. Hal ini terbukti dari masih kurangnya prasarana penunjang berupa jalan dan fasilitas lainnya serta kegiatan paket lainnya.

Sistem transportasi di Kota Blitar terdiri atas transportasi jalan raya dan kereta api. Secara keseluruhan sistem transportasi jalan raya.

Prasarana dan sarana transportasi yang ada, pada prinsipnya telah menjangkau hampir seluruh Kota Blitar.

BAB III
GAMBARAN UMUM PROFIL KEPENDUDUKAN, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

3.1 Kuantitas Penduduk

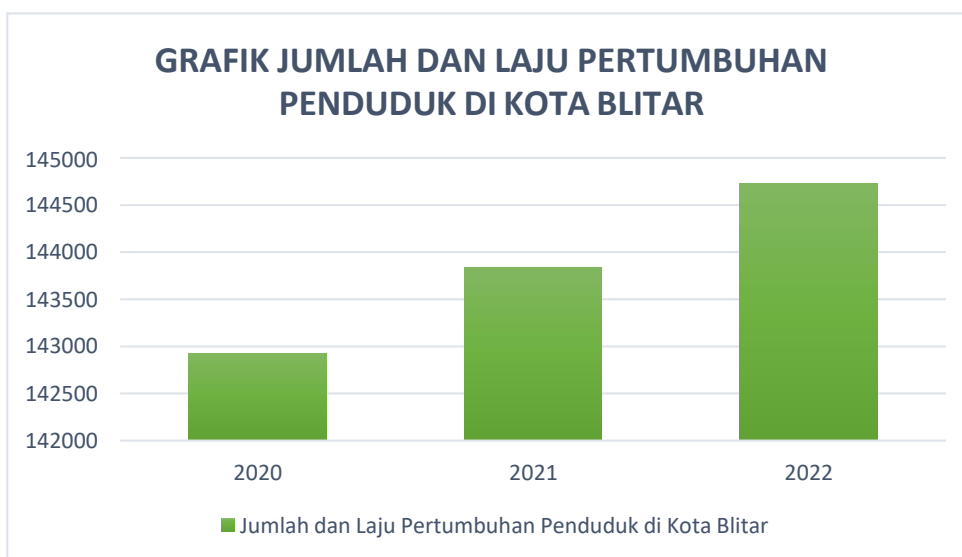
3.1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Blitar dari hasil proyeksi yaitu sebesar 144.727 jiwa pada tahun 2022 atau naik sebesar 0,616% dibandingkan tahun 2021 sebesar 143.840 jiwa.

Tabel 3.1
 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
 2020, 2021 dan 2022

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA) POPULATION			LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN/ANNUAL POPULATION GROWTH RATE (%)
	2020	2021	2022	2020-2022
1	2	3	4	5
Kota Blitar	142.920	143.840	144.727	0,18

Sumber : *Proyeksi Penduduk Supas 2022*



Jumlah penduduk terbesar dari tahun tercatat pada tahun 2022.

3.1.2 Komposisi Penduduk berdasarkan Umur, Jenis Kelamin dan Status Menikah

Sex Ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan. Jika sex ratio dikalikan 100 maka dapat diartikan bahwa tiap 100 penduduk perempuan terdapat sekian penduduk laki-laki. Pada umumnya sex ratio nilainya dibawah 100. Hal ini dikarenakan penduduk perempuan lebih tinggi angka harapan hidupnya sehingga penduduk perempuan menjadi lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Sex ratio dipakai untuk melihat perubahan penduduk menurut jenis

kelaminnya. Dengan membandingkan besarnya sex ratio dari tahun sebelumnya akan membawa kita pada sebuah pertanyaan mengapa perubahan itu terjadi. Perubahan itu bisa terjadi karena kelahiran, kematian dan migrasi.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Blitar
Tahun 2019 – 2022

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan		
1	2019	70.422	71.541	141.963	98,44
2	2020	70.891	72.029	142.920	98,42
3	2021	71.341	72.499	143.840	98,40
4	2022	71.774	72.953	144.727	98,38

Sumber : *Proyeksi Penduduk Supas 2022*

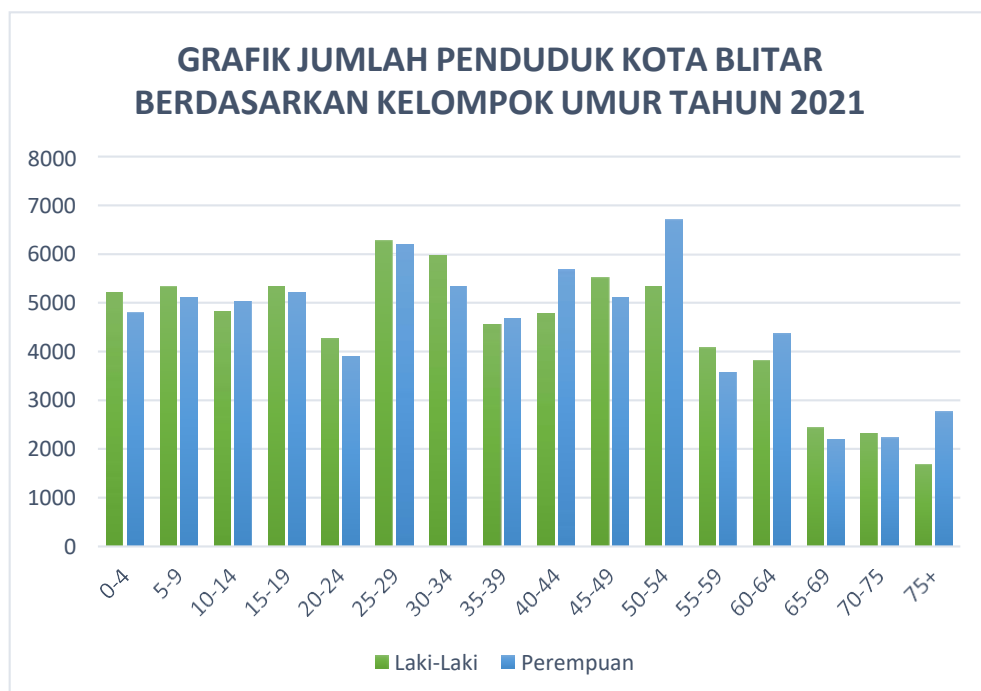


Pada tahun 2019 sampai dengan 2022, penduduk Kota Blitar yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada penduduk berjenis kelamin laki- laki, hal ini dibuktikan dengan sex ratio dari tahun 2019- 2022 sebesar 98% berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Blitar terbanyak ada di kelompok usia 25 tahun sampai dengan 29 tahun dan jumlah penduduk terendah ada pada kelompok umur 75 tahun ke atas. Berdasarkan jenis kelamin bahwasanya untuk kelompok umur 75 tahun keatas jumlah penduduk lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki yaitu 1.675 jumlah penduduk laki-laki dan 2.780 jumlah penduduk perempuan.

Tabel 3.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kota Blitar Tahun 2022

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN			%
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL	
1	2	3	4	5
0-4	5.216	4.795	10.011	6,92
5-9	5.340	5.119	10.459	7,23
10-14	4.832	5.036	9.868	6,82
15-19	5.333	5.204	10.537	7,28
20-24	4.265	3.910	8.175	5,65
25-29	6.278	6.191	12.469	8,62
30-34	5.980	5.331	11.311	7,82
35-39	4.562	4.673	9.235	6,38
40-44	4.780	5.689	10.469	7,23
45-49	5.513	5.119	10.632	7,35
50-54	5.336	6.718	12.054	8,33
55-59	4.095	3.575	7.670	5,30
60-64	3.809	4.373	8.182	5,65
65-69	2.448	2.207	4.655	3,22
70-75	2.312	2.233	4.545	3,14
75+	1.675	2.780	4.455	3,08
Jumlah/Total	71.774	72.953	144.727	100,00

Sumber : BPS Kota Blitar 2022



3.1.3 Jumlah Wanita Usia Subur

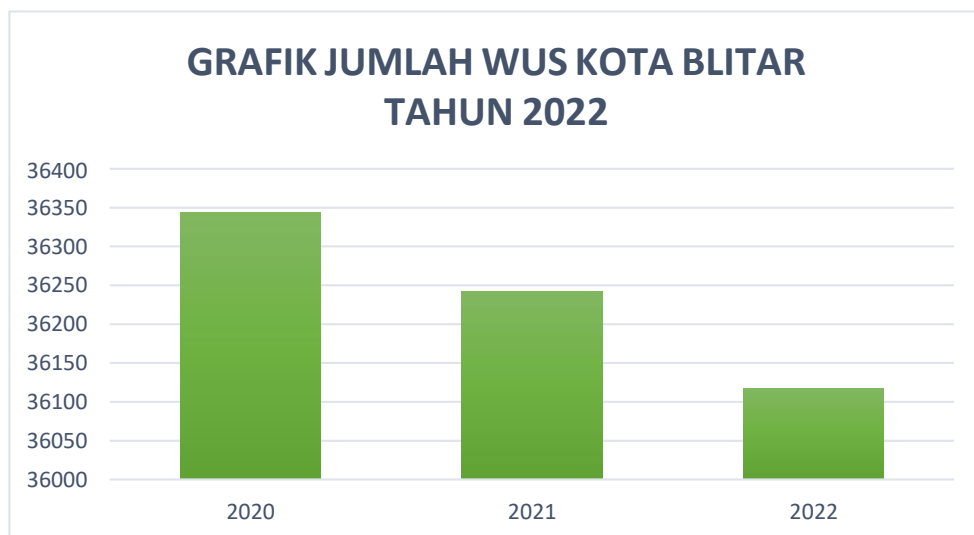
Wanita usia subur (WUS) berdasarkan konsep Departemen Kesehatan (2003) adalah wanita dalam usia reproduksi yaitu usia 15-49 tahun baik yang berstatus kawin, janda maupun yang belum menikah.

Wanita usia subur (WUS) yang akan memasuki jenjang perkawinan perlu dijaga kondisi kesehatannya. Kepada para WUS diberi pengertian tentang apa saja yang perlu di siapkan sebelum menikah, misalnya pemeliharaan kesehatan dalam masa pranikah dan pasca kehamilan, hubungan seksual yang bebas, kesiapan mental dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Kesehatan pada masa pranikah disampaikan kepada kelompok wanita usia subur (WUS) yang akan melangsungkan pernikahan. Penyampaian tentang kesehatan pada masa pranikah ini disesuaikan dengan tingkat intelektual WUS sebagai para calon ibu. Informasi yang diberikan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti karena bersifat pribadi dan sensitif.

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Wanita Usia Subur Kota Blitar Tahun 2022

No	Tahun	Wanita Usia Subur (Umur)							Total
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1	Tahun 2020	5278	3958	6246	5382	4721	5673	5086	36344
2	Tahun 2021	5243	3935	6214	5359	4699	5687	5105	36242
3	Tahun 2022	5204	3910	6191	5331	4673	5689	5119	36117

Sumber: BPS Kota Blitar 2022



Jumlah wanita usia subur (WUS) di Kota Blitar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan. Penurunan yang sangat pesat terjadi di tahun 2022. Dengan demikian perlu ditingkatkan juga penyuluhan tentang kesehatan pada masa pranikah dan pasca kehamilan, hubungan seksual yang bebas, kesiapan mental dalam menghadapi

kehamilan dan persalinan dengan tujuan agar wanita usia subur memahami informasi-informasi tersebut dan sudah siap pada saat memasuki jenjang pernikahan. Selain itu informasi-informasi tersebut juga dibutuhkan oleh wanita usia subur agar setelah menikah mereka bisa melahirkan anak-anak yang sehat dan bebas dari stunting.

3.1.4 Pasangan Usia Subur

Pasangan usia subur (PUS) berkisar antara usia 21-45 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Pada masa ini pasangan usia subur harus dapat menjaga dan memanfaatkan kesehatan reproduksinya yaitu menekan angka kelahiran dengan metode keluarga berencana, sehingga jumlah dan interval kehamilan dapat diperhitungkan untuk meningkatkan kualitas reproduksi dan kualitas generasi yang akan datang.

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, PUS sangat mudah dalam memperoleh keturunan dikarenakan keadaan kedua pasangan tersebut normal, hal inilah yang menjadi masalah bagi PUS yaitu perlunya pengaturan fertilitas (kesuburan), perawatan kehamilan dan persalinan aman. Dalam penyelesaian masalah tersebut diperlukan tindakan dari tenaga kesehatan dalam penyampaian penggunaan alat kontrasepsi rasional untuk menekan angka kelahiran dan mengatur kesuburan dari pasangan tersebut. Maka dari itu, petugas kesehatan harus memberikan penyuluhan yang benar dan dimengerti masyarakat luas.

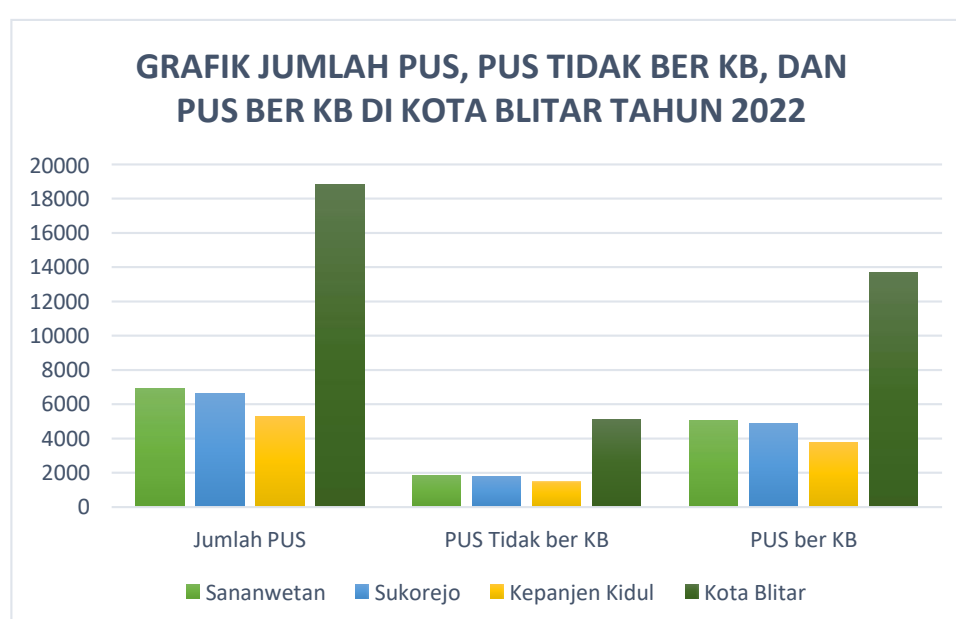
Dewasa ini, pemerintah melakukan suatu program dalam penekanan angka kelahiran karena kebanyakan penduduk Indonesia melakukan pernikahan dalam usia dini dimana masih banyak kesempatan/masa dimana keduanya memiliki keturunan yang banyak. Untuk itu, perlunya penyuluhan dalam mengatasi masalah tersebut dengan memperkenalkan alat kontrasepsi pada pasangan tersebut.

Para penyuluh KB dan petugas kesehatan harus memberi penyuluhan KB dan alat kontrasepsi, dan harus menyerahkan pilihan pada kedua pasangan tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan keinginannya dan kondisi fisiknya, karena kondisi fisik tiap-tiap orang berbeda.

Tabel 3.5
Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB dan Bukan Peserta KB
Kota Blitar Tahun 2022

NO	KABUPATEN /KOTA	JUMLAH PUS	PUS BUKAN PESERTA KB	PUS PESERTA KB	
			JUMLAH	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kecamatan					
1	Sananwetan	6920	1866	5054	73,03
2	Sukorejo	6644	1780	4864	73,21
3	Kepanjenkidul	5271	1487	3784	71,79
Kota Blitar		18835	5133	13702	72,75

Sumber : Laporan Statistik Rutin BKKBN Tahun 2022



Dari 144.727 penduduk Kota Blitar ada 18.835 Pasangan Usia Subur. Pasangan Usia Subur di Kota Blitar sebagian besar sudah sadar akan pentingnya merencanakan kehamilan demi kesehatan pasangan tersebut dan demi menjaga kualitas dari anak-anak mereka, hal ini bisa kita lihat dari perbandingan jumlah PUS yang ber KB dan jumlah PUS yang tidak ber KB. PUS yang ber KB di Kota Blitar jumlahnya lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah PUS yang tidak ber KB. Jumlah PUS yang ber KB yaitu 13.702 dan jumlah PUS yang tidak ber KB yaitu 5.133. Meski demikian pemberian KIE tentang KB kepada Pasangan Usia Subur (PUS) harus tetap digiatkan dengan tujuan agar PUS yang belum ber KB sadar akan pentingnya KB dan segera ikut KB serta mempertahankan kesertaan ber KB PUS yang sudah ber KB sehingga mereka tidak putus KB atau yang biasa dikenal dengan Drop Out (DO).

3.1.5 Distribusi Penduduk

Jumlah penduduk di suatu wilayah tidaklah tetap, namun akan selalu berubah (bertambah atau berkurang) sering dengan perjalanan waktu.

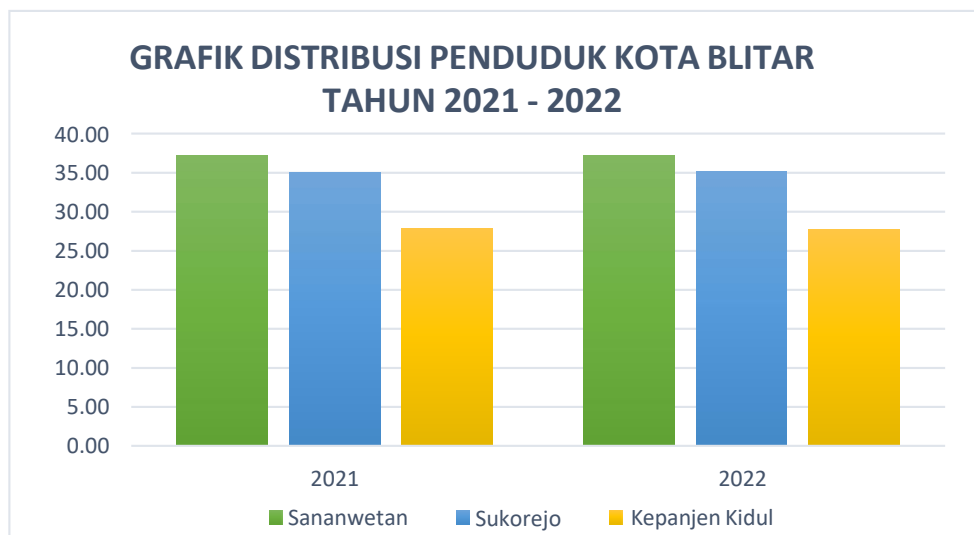
Pertambahan penduduk terjadi karena angka kelahiran dan angka kematian tidak seimbang, dimana angka kelahiran lebih besar dari angka kematian. Pertambahan penduduk juga dipengaruhi selisih angka penduduk yang masuk dan keluar suatu wilayah. Pertambahan penduduk suatu wilayah berupa angka-angka yang konkrit dalam pertambahan setiap tahunnya, sedangkan pertumbuhan penduduk berupa besaran persentasenya saja.

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Untuk Kota Blitar sendiri penyebaran penduduk di 3 Kecamatan juga mengalami perbedaan tetapi tidak terlalu mencolok. Hal ini disebabkan karena daya dukung lingkungan di tiap Kecamatan di Kota Blitar bias dikatakan sudah merata atau dengan kata lain tidak ada perbedaan daya dukung lingkungan antara Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Kepanjenkidul.

Tabel 3.6
Distribusi Penduduk Kota Blitar Tahun 2021 - 2022

KOTA BLITAR	PERSENTASE PENDUDUK	
	2021	2022
1	2	3
Kecamatan		
1. Sananwetan	37,18	37,17
2. Sukorejo	35,01	35,15
3. Kepanjenkidul	27,81	27,68
Kota Blitar	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Blitar



Tabel 3.7
Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun
Menurut Kecamatan Di Kota Blitar (per km²) Tahun 2022

KOTA BLITAR	KEPADATAN PENDUDUK	
	2021	2022
Kecamatan		
1. Sananwetan	5.307	5.385
2. Sukorejo	3.983	4.006
3. Kepanjenkidul	4.602	4.649
KOTA BLITAR	4.617	4.666

Sumber : BPS Kota Blitar Tahun 2022

3.2 Indikator Fertilitas

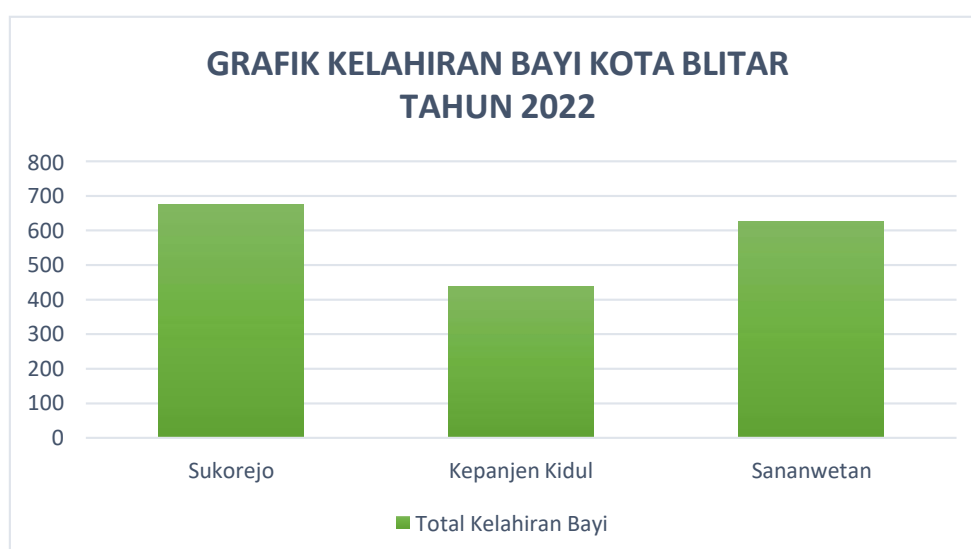
3.2.1 Angka Kelahiran Kasar / *Crude Birth Rate (CBR)*

Salah satu ukuran yang sering dipakai untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu negara atau wilayah (propinsi, kabupaten/kota) pada suatu waktu tertentu adalah Angka Kelahiran Kasar atau *Crude Birth Rate (CBR)*. Nilai CBR dari masa ke masa dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan (kenaikan atau penurunan) populasi penduduk di suatu negara atau wilayah dan dapat dibandingkan dengan negara-negara atau wilayah lain. Selain itu, nilai CBR dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan jumlah bayi lahir hidup dan jumlah ibu hamil.

Tabel 3.8
Angka Kelahiran Bayi Kota Blitar Tahun 2022

Kota Blitar	Kelahiran Bayi		TOTAL
	L	P	
Kecamatan			
1. Sananwetan	361	314	675
2. Sukorejo	212	227	439
3. Kepanjenkidul	309	318	627
Kota Blitar	882	859	1.741

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Blitar



Jumlah kelahiran di Kota Blitar pada tahun 2022 adalah 1.741. Tingkat kelahiran tertinggi berada di Kecamatan Sukorejo yaitu 675 atau

38,77% dan tingkat kelahiran terendah berada di Kecamatan Kepanjenkidul yaitu 439 atau 25,21%.

3.2.2 Usia Kawin Pertama (UKP).

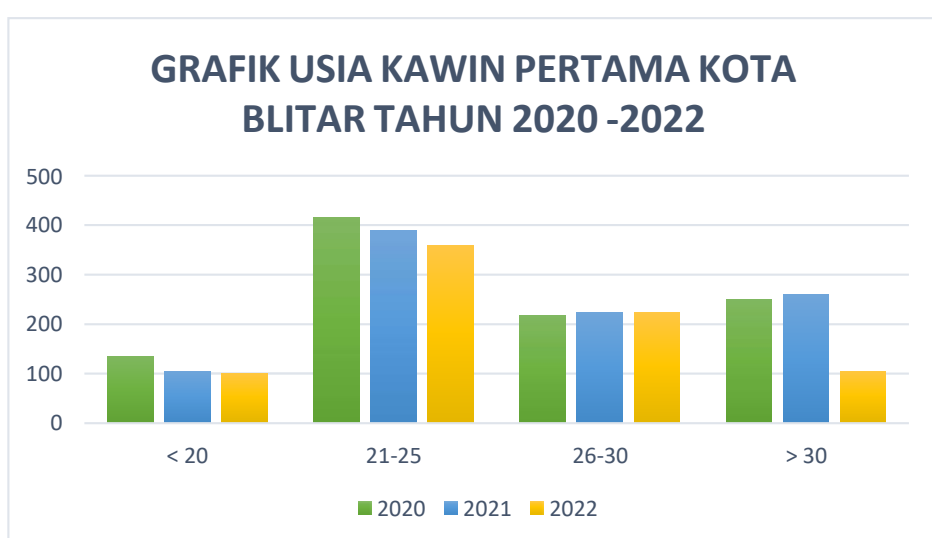
Perkawinan merupakan sarana untuk melanjutkan keturunan dan hal ini sangat berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dalam hal ini fertilitas. Secara teori pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi merupakan beban dalam pembangunan nasional. Pendidikan pada dasarnya mempengaruhi fertilitas melalui umur perkawinan. Semakin muda seseorang melakukan perkawinan makin panjang masa reproduksinya, sehingga semakin muda seseorang melangsungkan perkawinannya makin banyak pula anak yang dilahirkan. Rendahnya tingkat usia kawin pertama merupakan permasalahan krusial yang sedang dihadapi di beberapa negara dengan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, termasuk di Indonesia.

BKKBN melalui program Generasi Berencana (Genre) berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Salah satu upayanya adalah melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Usia minimal pernikahan berdasarkan PUP adalah 20 tahun bagi pemuda perempuan dan 25 tahun bagi pemuda laki-laki. Risiko yang ditimbulkan bagi perempuan hamil pada usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun adalah risiko kesakitan dan kematian (BKKBN, 2013). Risiko tersebut meliputi risiko pada proses kehamilan dan pada proses persalinan. Pada proses kehamilan, risiko yang ditimbulkan antara lain keguguran, pre eklampsia, anemia, dan bayi meninggal dalam kandungan. Sedangkan pada proses persalinan, risiko yang ditimbulkan antara lain premature, berat bayi lahir rendah, kelainan bawaan, kematian bayi, bahkan hingga kematian ibu. Risiko-risiko tersebut dapat terjadi pada wanita usia dibawah 20 tahun karena masih belum matangnya rahim perempuan usia muda untuk bereproduksi. Masih belum siapnya mental dalam berumah tangga juga menjadi salah satu penyebab munculnya risiko tersebut.

Tabel 3.9
Data Usia Kawin Pertama (UKP) Kota Blitar Tahun 2021 – 2022

Kota Blitar	Usia Kawin Pertama											
	2020				2021				2022			
	<20 TH	21-25 TH	26-30 TH	>30 TH	<20 TH	21-25 TH	26-30 TH	>30 TH	<20 TH	21-25 TH	26-30 TH	>30 TH
Kecamatan												
1.Sananwetan	38	159	82	84	34	141	92	87	16	70	58	35
2.Sukorejo	46	148	78	107	44	152	72	105	47	157	79	68
3.Kepanjenkidul	51	109	57	59	26	96	60	68	38	133	87	1
Kota Blitar	135	416	217	250	104	389	224	260	101	360	224	104

Sumber : Laporan Bulanan UKP (KUA se Kota Blitar)



Di Kota Blitar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 usia kawin pertama yang tertinggi adalah pada rentang 21 tahun sampai dengan 25 tahun pada tahun 2020, ini sudah sesuai dengan program yang dicanangkan oleh BKKBN, yaitu program Generasi Berencana (Genre), tetapi meski demikian masih ada usia kawin pertama yang di bawah usia 20 tahun. Di tahun 2022 jumlah usia kawin pertama di bawah 20 tahun sebanyak 101. Jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 104 dan tahun 2020 yang berjumlah 135. Melihat hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kota Blitar selama ini sudah berhasil. Meski jumlah perkawinan di bawah usia 20 tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan, sosialisasi tentang PUP harus tetap dilakukan agar di tahun – tahun berikutnya jumlah perkawinan di bawah usia 20 tahun tidak mengalami peningkatan dan bisa diturunkan lagi. Penyuluhan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bisa diberikan kepada remaja dan keluarga yang memiliki remaja melalui kegiatan BKR, PIK - R jalur sekolah maupun PIK - R jalur masyarakat.

3.3 Indikator Keluarga Berencana

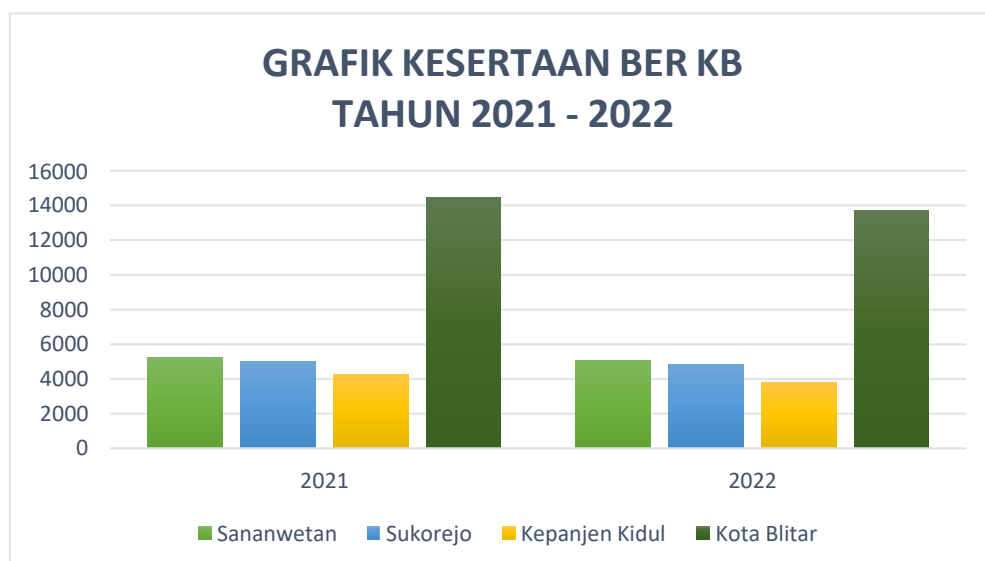
3.3.1 Pasangan Usia Subur (PUS)

Berdasarkan data statistik rutin BKKBN untuk tahun 2021 PUS Kota Blitar yang ikut KB mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Tahun 2020 jumlah PUS yang ber KB ada 14.856 sedangkan tahun 2021 jumlah PUS yang ber KB 14.463. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah karena jumlah PUS ditahun 2021 juga mengalami penurunan, yaitu dari 19.992 di tahun 2020 menjadi 19.501 di tahun 2021. PUS masih memiliki anak 1 dan ingin segera menambah anak, ada juga yang dikarenakan belum memiliki anak laki-laki atau perempuan sehingga PUS belum ingin berKB, dan satu lagi yang sering terjadi yang membuat PUS belum ber KB adalah masih adanya rasa takut baik takut untuk ber KB maupun takut untuk datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan selama pandemicovid 19 di tahun 2021. Ini semua bisa diatasi dengan cara meningkatkan pemberian KIE di masyarakat, khususnya pada Pasangan Usia Subur (PUS) dan perlu juga mengadakan pendekatan pada tokoh masyarakat dan tokoh agama agar tokoh-tokoh tersebut membantu mensosialisasikan tentang pentingnya ikut KB bagi Pasangan Usia Subur.

Tabel 3.10
Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Blitar
Tahun 2021-2022

Kota Blitar	JUMLAH PUS		PUS BUKAN PESERTA KB		PUS PESERTA KB	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Kecamatan						
1. Sananwetan	7144	6920	1910	1866	5234	5054
2. Sukorejo	6697	6644	1693	1780	5004	4864
3. Kepanjenkidul	5660	5271	1435	1487	4225	3784
Kota Blitar	19501	18835	5038	5133	14463	13702

Sumber : Laporan Statistik Rutin BKKBN Tahun 2021 dan 2022



3.3.2 Angka Kesertaan ber-KB / Contraceptive Prevalence Rate (CPR).

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja.

Cara menghitung CPR adalah membagi jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15-49 tahun) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi dengan jumlah seluruh perempuan usia 15-49 tahun, kemudian hasilnya dikali 100.

Tabel 3.11
Angka Kesertaan ber-KB (CPR) Kota Blitar
Tahun 2021 – 2022

Kota Blitar	CPR	
	2021	2022
Kecamatan		
1. Sananwetan	73,3	73,03
2. Sukorejo	74,7	73,21
3. Kepanjenkidul	74,6	71,81
Kota Blitar	74,2	72,7

Sumber : Statistik Rutin Tahun 2021 dan 2022



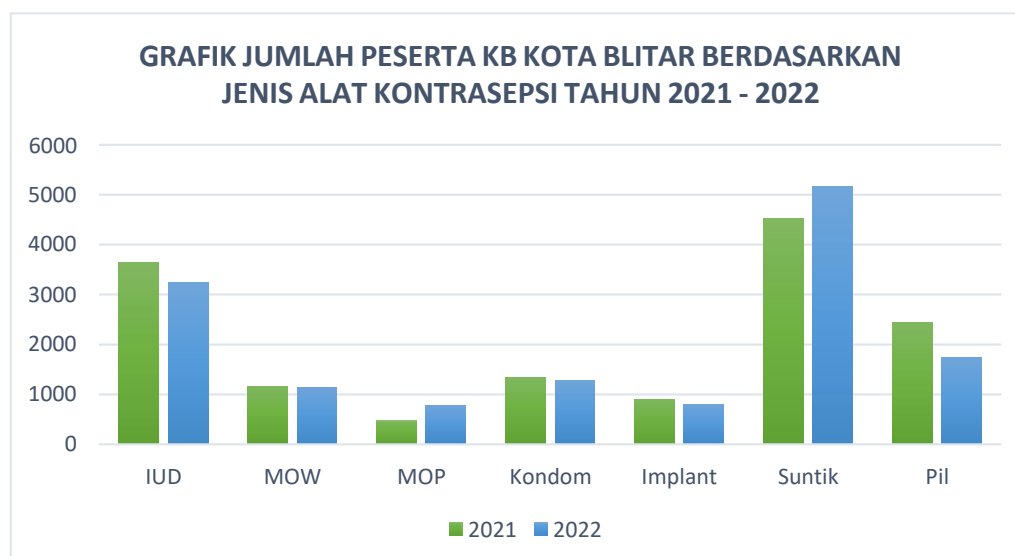
3.3.3 Jumlah Peserta KB Berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi

Keluarga Berencana (KB) menurut WHO merupakan tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapat objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga (Sulistiyawati, 2011). Alat kontrasepsi yang tersedia di Indonesia ada 2 jenis yaitu Non MKJP (kondom, suntik, pil) dan MKJP (IUD, implant, MOP, MOW). Kondisi yang ada di Indonesia masyarakat masih banyak yang menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek, padahal alat kontrasepsi jangka pendek memiliki resiko kegagalan cukup tinggi. Meskipun tingkat efektivitasnya rendah metode Non MKJP masih banyak diminati oleh akseptor KB di Indonesia. KB Non MKJP yang paling banyak diminati adalah suntik.

Tabel 3.12
Jumlah Peserta KB Berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi
Kabupaten/Kota Tahun 2021 – 2022

NO	Kota Blitar	IUD		MOW		MOP		KONDO		IMPLAN		SUNTIK		PIL		JML	JML
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Kecamatan																
1	Sananwetan	1513	1471	634	564	175	266	413	310	281	279	1370	1509	848	759	5234	5158
2	Sukorejo	1088	794	280	315	172	287	445	359	405	306	1715	2477	899	529	5004	5067
3	Kepanjenkidu	1039	972	252	259	123	235	479	605	211	221	1427	1179	694	447	4225	3919
	Kota Blitar	3640	3237	1166	1138	470	788	1337	1274	897	806	4512	5165	2441	1735	1446	14144

Sumber : Statistik Rutin Tahun 2021 dan 2022



Hal ini juga terjadi di Kota Blitar. Berdasarkan data di atas pasangan usia subur di Kota Blitar pada tahun 2022 paling banyak menggunakan KB suntik, yaitu sebanyak 5.165. Meskipun mereka sudah diberikan KIE tentang dampak positif dan negatif masing-masing alat kontrasepsi, tetapi mereka tetap banyak yang memilih suntik karena mereka merasa suntik itu lebih praktis dan tidak perlu memasukkan alat ke dalam tubuh. Sedangkan metode kontrasepsi yang paling sedikit peminatnya di Kota Blitar adalah MOP, yaitu sebesar 788 akseptor.

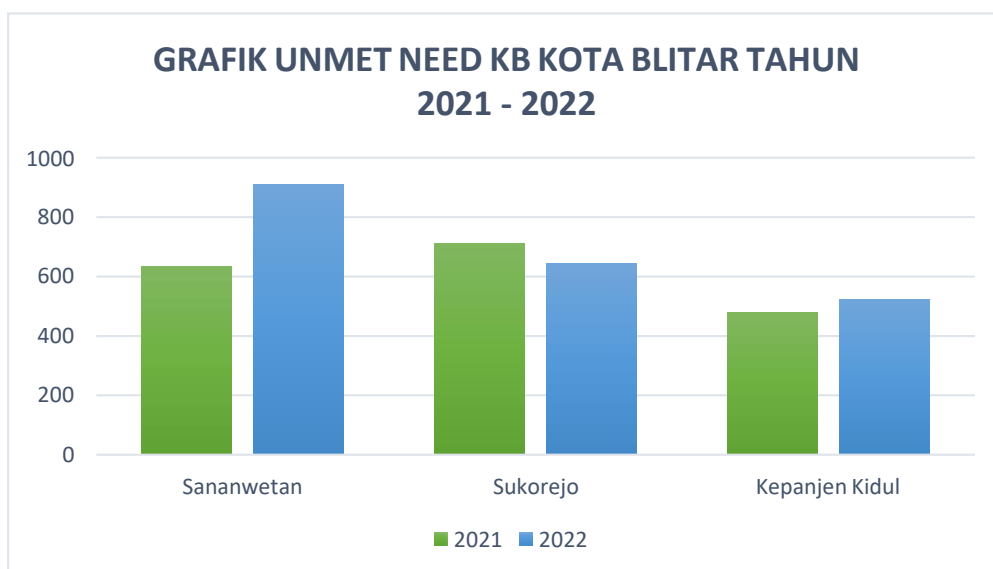
3.3.4 Unmet Need

Unmet Need KB adalah pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi. Tingginya angka Unmet Need KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang berakibat tingginya angka kelahiran dan memicu terjadi ledakan penduduk.

Tabel 3.13
Unmet Need Kota Blitar Tahun 2021 – 2022

Kota Blitar	Pasangan Usia Subur (PUS)		Unmet Need			
			Jumlah		%	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1. Sananwetan	7.144	6920	634	910	8,87	13,15
2. Sukorejo	6.697	6644	713	646	10,65	9,72
3. Kepanjenkidul	5.660	5271	478	522	8,45	9,90
Kota Blitar	19.501	18835	1.825	2078	9,36	11,03

Sumber: Laporan Statistik Rutin Tahun 2021 dan 2022



Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya BKKBN memiliki target atau KPP Unmet Need KB sebesar 7,03%. Namun capaian dari tahun 2021 sebesar 9,36 % dan 11,03% pada tahun 2022 untuk Unmet Need KB.

Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk ber KB masih belum optimal dan adanya rasa takut berkunjung ke fasilitas – fasilitas kesehatan selama pandemi covid 19, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan KIE di masyarakat khususnya pada pasangan usia subur dan mengadakan pendekatan pada tokoh formal, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

3.4 Indikator Kualitas Penduduk

3.4.1 Kesehatan

3.4.1.1 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup. Kegunaannya Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang menjadi bukti bahwa masyarakat Jawa Timur semakin sehat. Semakin tinggi AHH suatu wilayah mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi di wilayah tersebut semakin maju.

Tabel 3.14
 Angka Kematian Bayi Kota Blitar
 Tahun 2018 – 2022

Kota Blitar	Angka Kematian Bayi (AKB)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Blitar	13,75 per 1.000 KH	11,19 per 1.000 KH	11,22 per 1.000 KH	5,76 per 1.000 KH	9,19 per 1.000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Blitar



Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 angka kematian bayi tertinggi di Kota Blitar terjadi pada tahun 2018, yaitu mencapai angka 13,75 %, tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 angka kematian bayi sebesar 10,91 %. Namun pada tahun 2019 angka kematian bayi di Kota Blitar mengalami penurunan hingga pada tahun 2021 angka kematian bayi di Kota Blitar menjadi 5,76 %. Akan tetapi, pada tahun 2022 tingkat kematian bayi meningkat daripada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Blitar belum sudah sadar akan pentingnya kebersihan dan kesehatan bayi.

3.4.1.2 Cakupan Imunisasi Lengkap

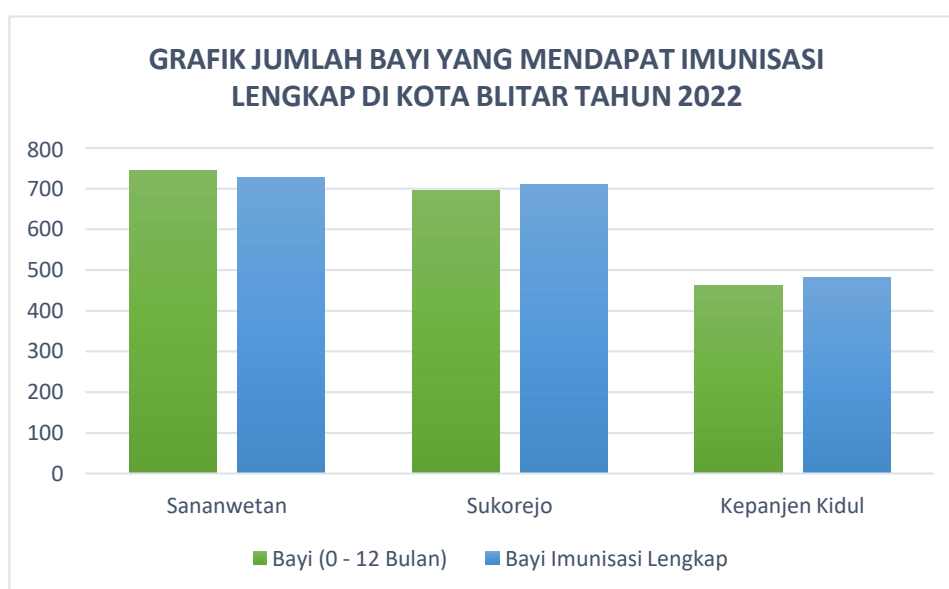
Tingkat kesehatan pada bayi perlu mendapatkan perhatian mengingat bayi atau anak sebagai generasi penerus bangsa. Salah satu upaya untuk menjadikan generasi yang sehat yaitu dengan mengurangi tingkat kematian pada anak sehingga dibutuhkan suatu upaya kesehatan yang konsisten untuk melindungi anak dari penyakit salah satunya dengan pemberian imunisasi. Imunisasi merupakan salah satu strategi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan derajat kesehatan nasional dengan mencegah enam

penyakit mematikan, yaitu : tuberculosis, dipteri, pertusis, campak, tetanus dan polio.

Tabel 3.15
Jumlah Bayi Yang Mendapat Imunisasi Lengkap
Kota Blitar Tahun 2022

Kecamatan	Kelahiran Bayi (0-12 bulan)	Bayi Imunisasi Lengkap
1. Sananwetan	744	728
2. Sukorejo	695	710
3. Kepanjenkidul	463	483
Kota Blitar	1902	1921

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Blitar



Berdasarkan data yang diperoleh dari profil Dinas Kesehatan Kota Blitar, pada tahun 2021 bayi di Kota Blitar yang berjumlah 2.214, yang sudah mendapatkan imunisasi sejumlah 2.062. Jadi sekitar 93,13 % bayi di Kota Blitar sudah mendapatkan imunisasi. Ini mencerminkan bahwa orang tua di Kota Blitar sudah sadar akan pentingnya pemberian imunisasi kepada bayi agar bayinya terhindar dari penyakit, terutama penyakit- penyakit yang mematikan.

3.4.1.3 Jumlah Bayi dengan Gizi Buruk

Untuk menunjang tumbuh kembangnya, anak-anak perlu mendapatkan makanan yang bergizi tinggi. Bila tidak terpenuhi dengan baik, bukan tidak mungkin sang buah hati mengalami gizi buruk. Tentu kondisi gizi buruk pada anak akan berdampak tidak baik bagi kesehatan dan tumbuh kembangnya.

Anak-anak yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup berpotensi mengalami komplikasi serta gangguan kesehatan jangka panjang, seperti:

1. Gangguan kesehatan mental dan emosional

Menurut *Children's Defense Fund*, anak-anak yang kekurangan asupan nutrisi berisiko menderita gangguan psikologis, seperti rasa cemas berlebih maupun ketidakmampuan belajar, sehingga memerlukan konseling kesehatan mental. Gizi buruk juga membawa dampak yang buruk bagi perkembangan dan kemampuan adaptasi anak pada situasi tertentu.

Sebuah studi "*India Journal of Psychiatry*" tahun 2008 mencatat dampak dari gizi buruk pada anak, yaitu:

- Kekurangan zat besi menyebabkan gangguan hiperaktif
- Kekurangan yodium menghambat pertumbuhan
- Kebiasaan melewatkan waktu makan atau kecenderungan pada makanan mengandung gula juga berkaitan dengan depresi pada anak.

2. Tingkat IQ yang rendah

Menurut data yang dilansir pada *National Health and Nutrition Examination Survey*, anak-anak dengan gizi buruk cenderung melewatkan pelajaran di kelas sehingga anak tidak naik kelas. Anak menjadi lemas, lesu, dan tidak dapat bergerak aktif karena kekurangan vitamin, mineral, dan nutrisi lainnya.

Hal ini didukung oleh data *World Bank* yang juga mencatat hubungan antara gizi buruk dan tingkat IQ yang rendah. Anak-anak ini juga mungkin mengalami kesulitan mencari teman karena masalah perilaku mereka. Gagalnya anak untuk mencapai aspek akademis dan sosial akibat gizi buruk tentu saja memiliki dampak negatif yang berkelanjutan sepanjang hidupnya apabila tidak segera disembuhkan.

3. Penyakit infeksi

Dampak gizi buruk lainnya yang kerap kali terjadi adalah risiko penyakit infeksi. Ya, anak dengan gizi yang kurang akan sangat rentan mengalami penyakit infeksi. Hal ini disebabkan oleh sistem kekebalan tubuhnya yang tak kuat akibat nutrisi tubuh yang tidak terpenuhi.

Ada banyak vitamin dan mineral yang sangat mempengaruhi kerja sistem kekebalan tubuh, misalnya vitamin C, zat besi, dan zink. Bila kadar nutrisi tersebut tidak tercukupi maka sistem kekebalan tubuhnya juga buruk.

Belum lagi jika ia kekurangan zat gizi makro seperti karbohidrat dan protein yang merupakan sumber energi dan

pembangun sel-sel tubuh. Kekurangan nutrisi tersebut akan membuat fungsi tubuhnya terganggu.

4. Anak pendek dan tidak tumbuh optimal

Pertumbuhan dan perkembangan si kecil terhambat adalah dampak gizi buruk pada anak. Ketika mengalami masa pertumbuhan, si kecil sangat memerlukan zat protein yang diandalkan untuk membangun sel-sel tubuh dan karbohidrat sebagai sumber energi utama tubuh.

Bila tidak ada protein dan zat nutrisi lainnya, maka bukan tidak mungkin pertumbuhan si kecil terhambat bahkan berhenti sebelum waktunya.

Maka untuk terus memantau kesehatan sang buah hati, apalagi jika ia masih dalam usia di bawah lima tahun. Dengan mengetahui status gizinya, akan mengetahui apakah perkembangan si kecil normal atau itu. Untuk itu, sebaiknya selalu periksakan anak ke dokter dengan rutin.

Tabel 3.16
Jumlah Bayi Gizi Buruk Kota Blitar Tahun 2022

Kota Blitar	Kelahiran Bayi (0-12 Bulan)	Bayi Gizi Buruk
Kecamatan		
1. Sananwetan	627	0
2. Sukorejo	439	0
3. Kepanjenkidul	675	0
Kota Blitar	1741	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Blitar



Pada tahun 2022 di Kota Blitar dari 1.741 kelahiran bayi (0-12 bulan), ada 0 kasus gizi buruk pada bayi atau sekitar 0,00 %. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus gizi buruk pada bayi di

Kota Blitar tidak ada. Hal ini disebabkan karena semua elemen di Kota Blitar, baik dari pemerintah maupun masyarakat sudah menyadari akan pentingnya memperhatikan gizi khususnya pada bayi. Meskipun jumlah kasus gizi buruk pada bayi tidak ada, kita masih harus tetap mensosialisasikan tentang pentingnya memperhatikan gizi bayi agar di tahun 2023 tidak ada lagi kasus gizi buruk pada bayi.

3.4.1.4 Jumlah Pemberian ASI Eksklusif

World Health Organization (WHO) sejak tahun 2002 telah membuat standar tentang makanan bayi, termasuk ASI. WHO merekomendasikan agar proses menyusui dimulai sedini mungkin hingga Si Kecil berusia 6 bulan. Selama masa ini, Si Kecil hanya diperbolehkan minum ASI saja. Setelah 6 bulan, barulah Si Kecil boleh dikenalkan dengan MP-ASI (Makanan Pendamping ASI). Namun, WHO tetap menyarankan pemberian ASI tetap diteruskan hingga Si Kecil berusia 2 tahun atau lebih. Manfaat ASI eksklusif bagi Bayi, ada beberapa fakta penting yang perlu diketahui tentang ASI:

1. ASI Merupakan Sumber Nutrisi

ASI mengandung nutrisi yang penting bagi Si Kecil. Salah satunya, sebagai sumber energi terbaik. Untuk Si Kecil usia 6-12 bulan, ASI dapat memberikan setengah atau lebih dari kebutuhan energinya, sementara setelah memasuki usia 12-24 bulan sepertiga dari kebutuhan energinya bisa terpenuhi dari ASI. Selain itu, saat sakit ASI juga berperan penting sebagai asupan nutrisi bagi Si Kecil. Bahkan, menurut informasi dari WHO, pemberian ASI secara eksklusif bisa kurangi angka kematian anak-anak yang kekurangan gizi.

2. Melindungi Si Kecil dari Infeksi

Memberikan ASI dalam waktu satu jam setelah melahirkan dapat melindungi Si Kecil dari infeksi penyakit, salah satunya diare. Dengan begitu, angka kematian anak akibat infeksi ini bisa dikurangi.

3. Mendukung Kecerdasan Si Kecil

Dalam jangka panjang, pemberian ASI bisa mendukung Si Kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas. Berdasarkan penelitian yang dilansir WHO, anak yang mendapatkan ASI eksklusif cenderung memiliki IQ yang lebih tinggi. Selain itu, semakin lama usia menyusui, juga berhubungan dengan berkurangnya risiko gangguan mental pada anak.

4. Sistem Kekebalan Tubuh Pertama Si Kecil

Air Susu Ibu sering juga disebut sebagai „darah putih“, karena mengandung sel-sel yang berperan penting dalam melawan kuman-kuman jahat penyebab penyakit dan juga merupakan sistem imun pada saluran cerna Si Kecil setelah lahir. Di dalam kandungan ASI, peneliti menemukan sel-sel yang berfungsi sebagai kekebalan tubuh bagi Si Kecil, di antaranya makrofag, limfosit, dan kolostrum.

5. Menyusui Bisa Membantu Ibu Lebih Sehat

Menyusui juga memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan Ibu, karena dapat mengurangi risiko kanker ovarium dan juga payudara. Pemberian ASI eksklusif bagi bayi di Indonesia sejak bayi lahir hingga bayi berumur 6 (enam) bulan, dan dianjurkan dilanjutkan hingga anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makan tambahan yang sesuai.

Mengacu pada hal tersebut maka pertanyaan mengenai pemberian ASI dalam susenas 2017 ditujukan pada baduta.

3.5 Pendidikan

3.5.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu wilayah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan.

APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah di suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

$$\text{APS 7 - 12 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APS 13 - 15 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$$

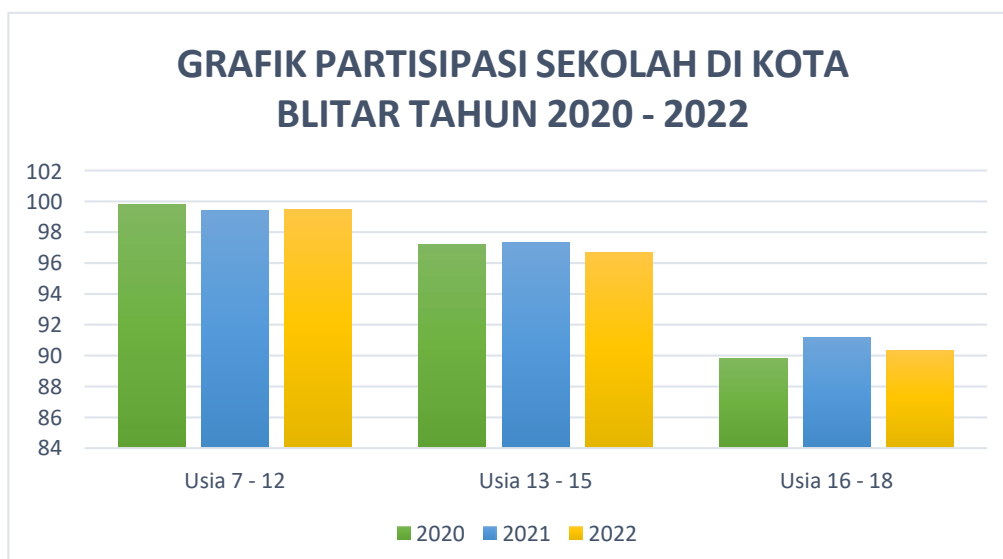
$$\text{APS 16 - 18 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APS 19 - 24 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 19 - 24 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 - 24 tahun}} \times 100\%$$

Tabel 3.17
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Blitar Tahun 2022

Kota Blitar	Usia 7-12			Usia 13-15			Usia 16-18		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kota Blitar	99,79	99,45	99,49	97,22	97,35	96,69	89,79	91,17	90,53

Sumber : Badan Pusat Statistik



Rata-rata APS di Kota Blitar untuk usia 7-12 tahun sudah tinggi, pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu dari 99,45 % di tahun 2021 menjadi 99,49 % di tahun 2022. Sedangkan untuk usia 13-15 tahun, di tahun 2021 mencapai 97,35 % dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 96,69 %. Untuk usia 16-18 tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Blitar mengalami penurunan juga sama seperti APS untuk usia 13-15 tahun, yaitu 91,17 % di tahun 2021 dan di tahun 2022 mencapai 90,53 %. Walaupun terdapat beberapa penurunan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Blitar telah memperoleh pendidikan 12 tahun, sesuai dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena selain penduduk Kota Blitar sadar akan pentingnya pendidikan juga

karena adanya peran aktif dari pemerintah Kota Blitar untuk mendorong agar penduduk Kota Blitar bisa mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan 12 tahun yang dimulai dari SD sampai dengan SMA. Peran aktif Pemerintah Kota Blitar diantaranya adalah mengeluarkan peraturan sekolah gratis untuk sekolah negeri dan menyediakan transportasi gratis untuk anak sekolah berupa bus sekolah dan sepeda yang dipinjamkan kepada anak-anak sekolah.

3.5.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang tertentu dengan seluruh penduduk menurut kelompok usia tertentu dikalikan seratus.

$$APK \text{ SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$$

$$APK \text{ SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$

$$APK \text{ SM} = \frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$$

$$APK \text{ PT} = \frac{\text{Jumlah murid PT/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\%$$

Tabel 3.18
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Blitar Tahun 2022

Kota Blitar	Usia 7-12 th			Usia 13-15 th			Usia 16-18		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kota Blitar	101,83	100,76	101,26	100,67	103,03	90,42	105,91	106,09	105,89

Sumber : Badan Pusat Statistik



APK SD di Kota Blitar pada tahun 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021 APK SD mencapai 100,76 % dan pada tahun 2021 APK SD Kota Blitar menjadi 100,26 %, hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah PUS dan peningkatan kesertaan ber KB di Kota Blitar, sehingga berkurang juga jumlah anak yang berusia 7-12 tahun. Untuk APK SMP pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021, yaitu 103,03 % pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 menurun menjadi 90,42 %. Sedangkan APK SMA pada tahun 2021 mencapai sekitar 106,09 % dan pada tahun 2022 menjadi 105,89%.

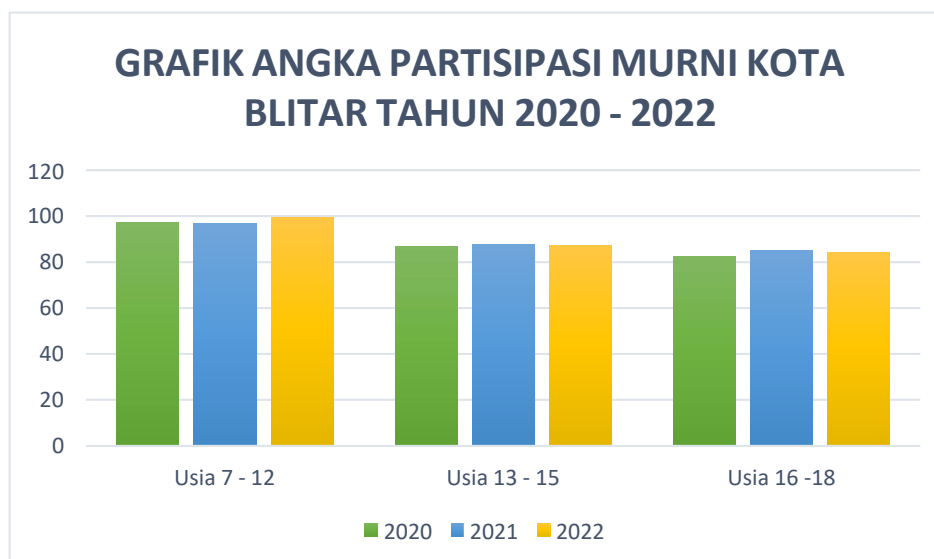
3.5.3 Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan sebagai indikator untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Indikator ini dapat menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Tabel 3.19
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Blitar Tahun 2022

Kota Blitar	Usia 7-12 th			Usia 13-15 Th			Usia 16-18 Th		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kota Blitar	97,12	96,62	99,49	86,63	87,62	87,38	82,58	85,02	84,06

Sumber : Badan Pusat Statistik



Pada tahun 2022 ada kelompok usia APM Kota Blitar yang menunjukkan peningkatan, yaitu pada kelompok usia 7 – 12 tahun. Meskipun mengalami peningkatan, hal ini tidak berarti bahwa masyarakat kota Blitar tidak memahami pentingnya program KB. Peningkatan ini disebabkan karena banyaknya minat bersekolah penduduk Kota Blitar. Para orangtua sudah menyadari pentingnya pendidikan bagi anak mereka, khususnya pendidikan yang dimulai sejak usia 7 – 12 tahun.

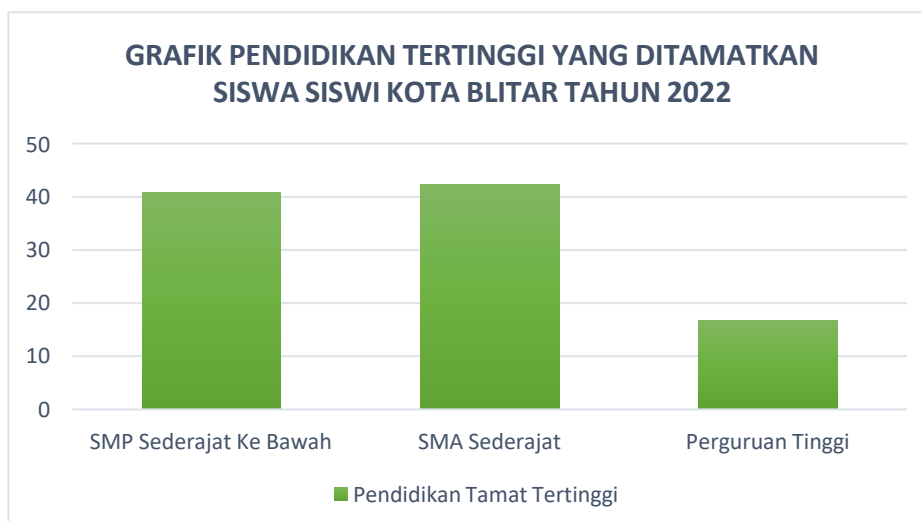
3.5.4 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia adalah dengan melihat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Intelektual seseorang pada umumnya akan semakin meningkat seiring dengan bertambah tingginya tingkat pendidikan seseorang. Demikian pula dengan kemampuan melakukan interaksi sosial. Meskipun sebetulnya pendidikan dapat diperoleh di luar jalur formal, seperti di balai pelatihan keterampilan, forum-forum diskusi, kelompok-kelompok belajar pemberdayaan masyarakat, serta pada kegiatan swadaya masyarakat lainnya.

Tabel 3.20
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Kota Blitar Tahun 2022

Kota Blitar	SMP Sederajat Ke Bawah	SMA Sederajat	Perguruan Tinggi	Jumlah
Kota Blitar	40,88	42,41	16,71	100,00

Sumber : BPS (Laporan Eksekutif Pendidikan Prov.Jatim)



Berdasarkan data BPS tahun 2022 bahwa di Kota Blitar pendidikan tertinggi yang ditamatkan umumnya pada tingkat SMA sederajat yaitu sebesar 42,41 %. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kota Blitar tergolong baik.

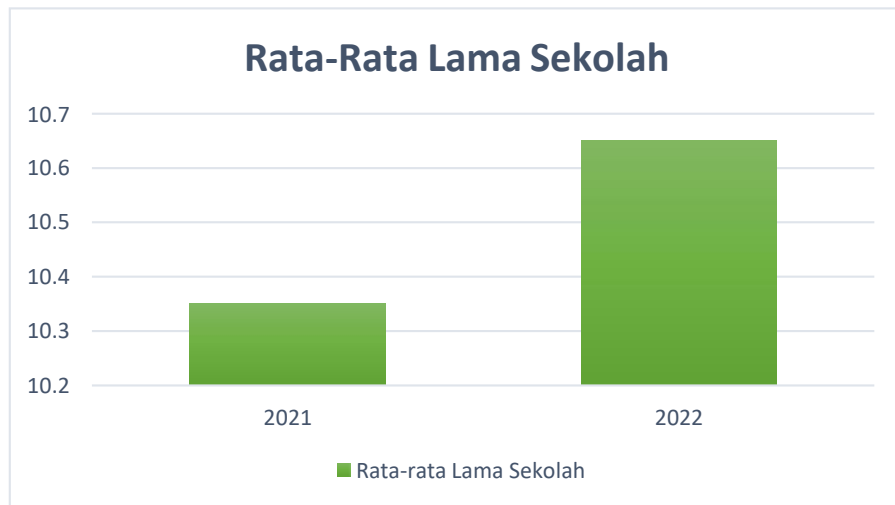
3.5.5 Rata-rata Lama Sekolah

Tingkat pendidikan suatu masyarakat dapat juga digambarkan melalui indikator rata-rata lama sekolah masyarakat tersebut. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tahun standar yang harus dihabiskan seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya sekolah atau *years of schooling*, adalah suatu angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang mulaidari masuk pada jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang pendidikan terakhir.

Tabel 3.21
Rata-rata Lama Sekolah Kota Blitar Tahun 2022

Kota	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Kota Blitar	10,35	10,65

Sumber : BPS - Statistik Pendidikan Kota Blitar



Rata-rata lama sekolah di Kota Blitar pada tahun 2022 mengalami peningkatan, yaitu dari 10,35 pada tahun 2021 menjadi 10,65 pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pada tahun 2022 penduduk Kota Blitar yang berusia 15 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 10,65 tahun atau sudah hampir menamatkan kelas XI.

3.5.6 Jumlah Sekolah, Tenaga Pengajar dan Murid

Berdasarkan data BPS, banyaknya sekolah SD selama tahun 2022 yang tercatat pada Dinas Pendidikan Kota Blitar sebanyak 73 sekolah dengan jumlah murid 16.712 dan jumlah guru 1.056. Sedangkan untuk SMP selama tahun 2022 yang tercatat sebanyak 27 sekolah dengan jumlah murid 11.464 dan jumlah guru 747. SMA selama tahun 2022 tercatat sebanyak 27 sekolah dengan murid sebanyak 15.865 dan jumlah guru 974.

Dengan melihat angka-angka yang ada pada tabel di bawah dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa terbanyak ada pada tingkat SD, dan jumlah siswa terkecil adalah pada tingkat SMP. Untuk jumlah gedung SMA di Kota Blitar sudah cukup memadai.

Tabel 3.22
Rasio Murid - Guru SD Kota Blitar Tahun 2022

Kota	Sekolah Dasar (SD)			
	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kecamatan				
Sananwetan	26	7268	445	16,33
Sukorejo	22	4342	277	15,68
Kepanjenkidul	25	5102	334	15,28
Kota Blitar	73	16712	1056	15,83

Sumber : BPS - Statistik Pendidikan Kota Blitar

Tabel 3.23
Rasio Murid - Guru SMP Kota Blitar Tahun 2022

Kota Blitar	Sekolah Menengah Pertama (SMP)			
	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid- Guru
Kota Blitar	27	11464	747	15,35

Sumber : BPS - Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.24
Rasio Murid-Guru SMA Kota Blitar Tahun 2022

Kota Blitar	Sekolah Menengah Atas (SMA)			
	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kota Blitar	27	15865	974	16,29

Sumber : BPS - Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur

3.6 Ketenagakerjaan

3.6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan data BPS Jawa Timur bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak penduduk usia kerja yang ikut aktif di dalam perekonomian. Indikator ini merupakan perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Pada tahun 2021, TPAK di Kota Blitar tercatat sebesar 69,96 %. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan TPAK pada tahun 2020 yang mencapai 69,53%. Sementara pada tahun 2023 belum ada. Jadi bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk usia kerja yang ikut aktif di dalam perekonomian meningkat pada tahun 2021.

Tabel 3.25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Blitar Tahun 2022

Kota Blitar	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)			
	2019	2020	2021	2022
Kota Blitar	72,15	69,53	69,96	Belum ada

Sumber : BPS Jawa Timur - Laporan Eksekutif keadaan Angkatan Kerja



3.6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berdasarkan data BPS Jawa Timur khususnya Laporan Eksekutif keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur bahwasanya Indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) sering digunakan pemerintah dalam menilai keberhasilan kinerjanya di bidang ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan mengetahui lebih lengkap informasi mengenai tingkat pengangguran di Jawa Timur, diharapkan kebijakan yang akan diambil pemerintah sejalan dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 3.26
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Blitar Tahun 2022

Kota Blitar	Tahun		
	2020	2021	2022
Kota Blitar	4,68	6,61	Belum ada

Sumber : BPS Jawa Timur - Laporan Eksekutif keadaan Angkatan Kerja



Pada tahun 2021 TPT di Kota Blitar mengalami kenaikan yang cukup besar menjadi 6,61 % dari 4,68 % pada tahun 2020. Dengan TPT sebesar 6,61%, dapat diterjemahkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6-7 orang pengangguran. Ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Blitar, karena jumlah pengangguran tersebut bukan jumlah yang sedikit sehingga upaya dalam menekan angka pengangguran di Kota Blitar masih diperlukan. Salah satu penyebab masalah pengangguran meningkat di tahun 2021 adalah adanya pandemi Covid-19, dimana banyak perusahaan swasta yang mengalami penurunan omset atau bahkan ada yang mengalami kebangkrutan, sehingga tidak bisa melanjutkan usahanya. Perusahaan yang mengalami penurunan omset akan mengurangi juga jumlah tenaga kerjanya, sedangkan perusahaan yang bangkrut akan memberhentikan semua pekerjanya.

Hal lain yang menyebabkan tingginya angka pengangguran adalah pola pikir pada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa bekerja itu harus di instansi pemerintah atau perusahaan. Hal ini salah satunya terlihat dari fenomena penganggur terdidik atau mereka yang berpendidikan tinggi (SMA sederajat atau Perguruan Tinggi) dan berstatus menganggur. Di sisi lain, kesempatan kerja yang tersedia di kedua lini tersebut masih sangat terbatas. Selain itu, masih rendahnya kualitas tenaga kerja pun menjadi kendala lain yang masih dihadapi dalam permasalahan ketenagakerjaan di Kota Blitar. Sementara itu, data pada tahun 2022 belum ada.

3.7 Data Pembangunan Keluarga

3.7.1 Jumlah keluarga sejahtera dan Keluarga Pra Sejahtera

3.7.1.1 Keluarga Pra Sejahtera

Indikator Kesejahteraan Keluarga Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2010, Keluarga Pra sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah.

3.7.1.2 Keluarga Sejahtera

Indikator Kesejahteraan Keluarga Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2010, Keluarga Sejahtera yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan psikologisnya (*psychological needs*) seperti kebutuhan ibadah, makan protein

hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca dan tulis latin.

3.7.2 Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

Program Bina Keluarga Balita (BKB) menjadi salah satu program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam pembinaan tumbuh kembang anak yang dilakukan semenjak anak dalam kandungan sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pos pelayanan terpadu (posyandu), bina keluarga balita (BKB), pendidikan anak usia dini (PAUD) yang pelayanannya dilaksanakan secara holistik integratif.

Tabel 3.27
Jumlah Bina Keluarga Balita
Kota Blitar Tahun 2020 – 2022

Kota Blitar	Kelompok BKB			Keluarga Anggota BKB		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kecamatan						
Sananwetan	35	35	38	2080	1983	291
Sukorejo	21	21	22	507	512	320
Kepanjenkid	21	21	19	543	536	240
Kota Blitar	77	77	79	3.130	3.031	851

Sumber : BKKBN – Laporan Statistik Rutin



Jumlah kelompok BKB di Kota Blitar mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan jumlah 79, dengan paling banyak terdapat di kecamatan Sananwetan dengan jumlah 38. Untuk jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB juga mengalami penurunan, pada tahun 2021 berjumlah 3.031, pada tahun 2022 menjadi 851. Hal ini disebabkan karena

PUS di Kota Blitar sudah sadar untuk ikut KB, sehingga berakibat penurunan jumlah keluarga yang memiliki balita.

3.7.3 Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)

Bina Keluarga Remaja adalah wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja usia 10 – 24 tahun dan belum menikah. Program ini merupakan aplikasi dari program Generasi Berencana (GenRe) yang dilakukan melalui pendekatan kepada keluarga yang mempunyai remaja. Bina Keluarga Remaja bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja, dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi anggota kelompok. Bina Keluarga Remaja merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) khususnya untuk meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dalam rangka pembangunan Sumber Daya Manusia yang bermutu, tangguh, maju dan mandiri.

Bina Keluarga Remaja dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari orang tua dan anak remaja yang dibimbing dan dibantu oleh fasilitator/motivator/kader dari tenaga masyarakat secara sukarela dengan pembinaan oleh pemerintah. Program Bina Keluarga Remaja merupakan suatu wadah yang berupaya untuk mendapatkan pemahaman orang tua dalam mendidik anak remaja yang benar yang dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok kegiatan, dimana orang tua mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan dan membina tumbuh kembang anak remaja.

Melalui kelompok Bina Keluarga Remaja setiap keluarga yang memiliki remaja dapat saling bertukar informasi dan berdiskusi bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan remaja dalam konteks fenomena pernikahan dini, meliputi Pendewasaan Usia Perkawinan, Komunikasi Efektif Orangtua terhadap Remaja, dan Peran Orangtua Dalam Pembinaan Tumbuh Kembang Remaja.

Pengembangan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dapat membantu orangtua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja. Melalui kelompok BKR setiap keluarga yang memiliki remaja dapat saling bertukar informasi dan berdiskusi bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan remaja, meliputi Kebijakan Program GenRe, Penanaman Nilai-Nilai Moral Melalui 8 Fungsi Keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan, Seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS, Keterampilan Hidup, Ketahanan Keluarga Berwawasan Gender, Komunikasi Efektif Orang tua terhadap Remaja, Peran Orang tua dalam

Pembinaan Tumbuh Kembang Remaja, Kebersihan dan Kesehatan Diri Remaja, dan Pemenuhan Gizi Remaja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program Bina Keluarga Remaja adalah program yang dibuat untuk membentuk karakter remaja melalui keluarga dan pola asuh orang tua, yang telah diidentifikasi sebagai pengaruh penting dalam pembentukan karakter remaja. Proses pola asuh orang tua meliputi kedekatan orang tua dengan remaja, pengawasan orang tua, dan komunikasi orang tua dengan remaja. (BKKBN, 2012).

Tabel 3.28
Jumlah Bina Keluarga Remaja
Kota Blitar Tahun 2020 – 2022

Kota Blitar	Kelompok BKR			Keluarga Anggota BKR		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kecamatan						
Sananwetan	7	7	7	483	587	75
Sukorejo	15	15	15	216	316	236
Kepanjenkidul	9	9	7	333	336	144
Kota Blitar	31	31	29	1032	1238	455

Sumber : BKKBN – Laporan Statistik Rutin



Jumlah kelompok BKR di Kota Blitar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan dari 31 kelompok di tahun 2021 menjadi 29 kelompok di tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 jumlah kelompok BKR tidak mengalami perubahan. Jumlah keluarga anggota BKR dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan, yaitu dari 1238 keluarga di tahun 2021 menjadi 455 keluarga di tahun 2022. Menurunnya jumlah keluarga yang menjadi anggota BKR disebabkan karena para orang tua dan keluarga remaja belum sadar kondisi di masyarakat saat ini yang bisa memberi pengaruh negatif kepada para remaja, oleh karena itu para orang tua dan keluarga remaja butuh

informasi-informasi seputar remaja yang bisa didapatkan melalui kelompok BKR.

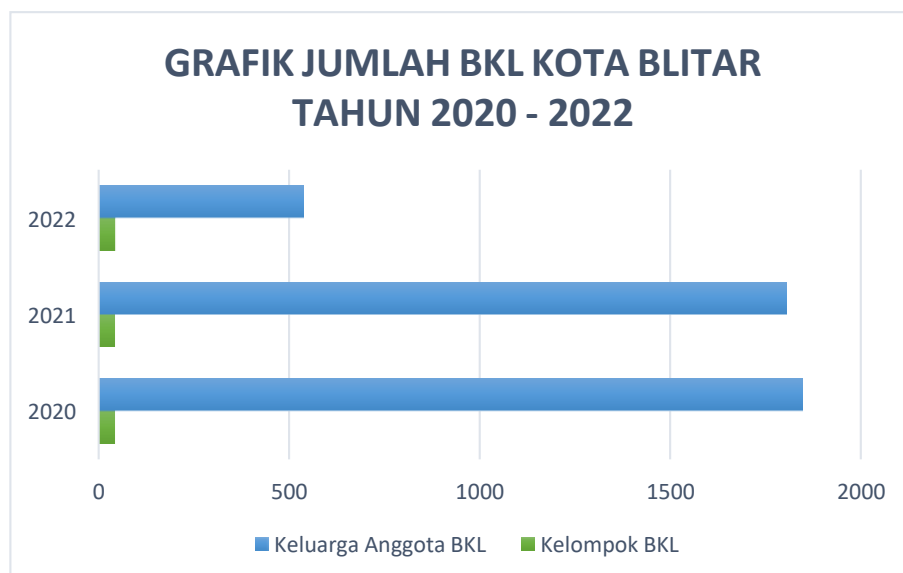
3.7.4 Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)

BKKBN merupakan salah satu lembaga yang memberikan suatu wadah bagi lanjut usia dalam bentuk pembinaan dan penyuluhan yang berintegrasi dengan Kelompok Kerja (POKJA). Salah satu program yang dikembangkan saat ini adalah Bina Keluarga Lansia (BKL). BKL menurut BKKBN adalah wadah kegiatan bagi lanjut usia yang berusaha meningkatkan kegiatan dan keterampilan keluarga dalam memberikan pelayanan, perawatan dan pengakuan yang layak sebagai orang tua bagi lanjut usia tidak potensial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga lanjut usia melalui kegiatan pemberdayaan, pembinaan serta pengembangan potensi bagi lanjut usia.

Tabel 3.29
Jumlah Bina Keluarga Lansia
Kota Blitar Tahun 2020 – 2022

Kota Blitar	Kelompok BKL			Keluarga Anggota BKL		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kecamatan						
Sananwetan	12	12	16	1.035	993	40
Sukorejo	16	16	16	372	372	243
Kepanjenkidul	16	16	13	441	441	255
Kota Blitar	44	44	45	1.848	1.806	538

Sumber : BKKBN Laporan Statistik Rutin



Kelompok BKL di Kota Blitar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dari 44 kelompok di tahun 2021 menjadi 45 kelompok di tahun 2022. Sedangkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 jumlah kelompok BKL tetap yaitu 44. Akan tetapi,

untuk keluarga anggota BKL mengalami penurunan. Pada tahun 2020, jumlah keluarga anggota BKL sebanyak 1.848, sementara pada tahun 2021 sebanyak 1.806. Penurunan juga terlihat pada tahun 2022, yaitu sebanyak 538. Maka dari itu, kegiatan di kelompok BKL ini harus tetap ditingkatkan agar lansia di Kota Blitar bisa menjadi lansia yang tangguh.

3.7.5 Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

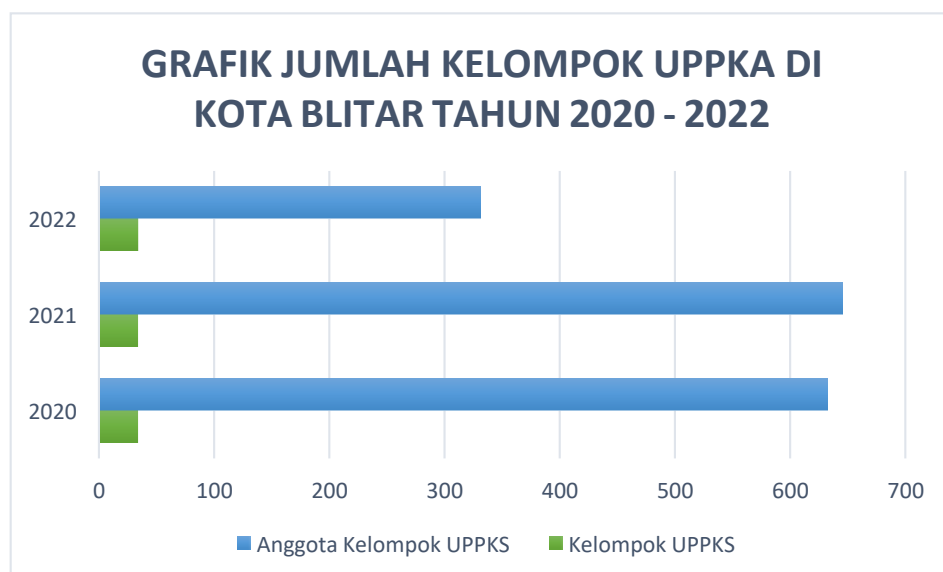
UPPKA adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari tahapan Keluarga Sejahtera, baik pasangan Usia Subur yang sudah ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkannya. Anggota UPPKA adalah Pasangan Usia Subur (PUS), Peserta Keluarga Berencana (KB), Remaja dan Lanjut Usia.

Tujuan UPPKA adalah mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif, mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga, meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga dan mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Tabel 3.30
Jumlah Kelompok UPPKA Kota Blitar Tahun 2020 - 2022

Kota Blitar	Kelompok UPPKA			Anggota Kelompok UPPKA		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kecamatan						
Sananwetan	9	9	11	251	257	44
Sukorejo	16	16	16	190	197	186
Kepanjenkidul	9	9	7	192	192	101
Kota Blitar	34	34	34	633	646	331

Sumber : BKKBN – Laporan Statistik Rutin



Jumlah kelompok UPPKA di Kota Blitar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tetap, yaitu 34 kelompok. Untuk jumlah anggota kelompok di tahun 2020 hingga 2021 mengalami peningkatan dari 633 di tahun 2020 menjadi 646 di tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah anggota kelompok UPPKA mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu 331 pada tahun 2022. Dengan menurunnya jumlah anggota kelompok UPPKA menunjukkan bahwa pembinaan kelompok-kelompok UPPKA belum membawa hasil yang baik. Meskipun di tahun 2021 ada peningkatan jumlah anggota UPPKA di Kota Blitar pembinaan kelompok-kelompok UPPKA tersebut tetap dipertahankan, agar dapat lebih meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya dan jumlah anggotanya bisa meningkat lagi.

3.8 Data Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana

3.8.1 Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) / Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

PKB merupakan ujung tombak pengelola KB di lini lapangan. Bila dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) jabatannya, para Penyuluh KB adalah juru penerang pada keluarga dan masyarakat luas menuju perubahan. Penyuluh KB juga merupakan salah satu komponen penting dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai indikator kemajuan yang telah dicapai oleh suatu daerah. Penyuluh KB bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan berbagai penyuluhan program KB

Peran PKB adalah Pengelola pelaksanaan kegiatan Program KB Nasional di desa/kelurahan, penggerak partisipasi masyarakat dalam program KB Nasional di desa/kelurahan, pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan program KB Nasional di desa/kelurahan, menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB Nasional di desa/kelurahan

Fungsi PLKB/PKB mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, melaporkan dan mengevaluasi program KB Nasional dan program pembangunan lainnya di tingkat Desa/Kelurahan.

TUGAS, FUNGSI DAN PERAN AKTIVITAS KEGIATAN

PKB	PLKB
- Melakukan Penyuluhan Program KKBPK	- Perencanaan
- Melakukan Pelayanan Program KKBPK	- Pengorganisasian
- Melakukan Penggerakan Program KKBPK	- Pelaksanaan
	- Pengembangan

- Melakukan Pengembangan Program KKBPK	
- Pembuatan Potensi Wilayah Perencanaan - Pendataan Keluarga Pendataan dan	Pembuatan Potensi Wilayah
- Advokasi dan KIE - Pengembangan media Advokasi dan KIE, Konseling - Pembuatan Materi - Pelaksanaan rakor	Pembinaan IMP dan Mitra Kerja Fasilitasi Peran IMP dan Mitra Kerja Dukungan Pelayanan KIE/Konseling dan Advokasi
- Fasilitasi Kelompok Poktan Fasilitasi - Pelayanan KB Pencatatan dan Pelaporan	Pencatatan dan Pelaporan

Tabel 3.31
Jumlah PKB/PLKB Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2022

Kota Blitar	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Plkb/Pkb/ Petugas Kb Desa/Kel.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Plkb/ Pkb/ Petugas Kb	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Plkb/Pk b/Petug as Kb Desa/Kel.
	2020			2021			2022		
Sananwetan	1	7	5	1	7	4	1	7	4
Sukorejo	1	7	4	1	7	4	1	7	4
Kepanjenkidul	1	7	4	1	7	4	1	7	4
Kota Blitar	3	21	13	3	21	12	3	21	12

Sumber : BKKBN – Laporan Statistik Rutin

Kota Blitar memiliki jumlah PKB yang cukup ideal, yaitu 12 orang dengan jumlah Kelurahan 21. Jadi 1 orang PKB mendapatkan 1 sampai dengan 2 wilayah binaan.

3.8.2 Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan Sub PPKBK

Pengertian Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) adalah seseorang atau beberapa orang Kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/ mengelola program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat desa/kelurahan sedangkan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (Sub PPKBK) adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program KKBPK di tingkat dusun/RW.

Tabel 3.32
Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD Kota Blitar
Tahun 2020 – 2022

Kota Blitar	Kecamatan	Desa /Kelurahan	PPkbd	Sub Ppkbd	Kecamatan	Desa/K elurahan	PPkbd	Sub Ppkbd	Kecamatan	Desa/K elurahan	PPkbd	Sub Ppkbd
	2020				2021				2022			
Kecamatan												
Sananwetan	1	7	7	117	1	7	11	118	1	7	11	118
Sukorejo	1	7	7	96	1	7	8	91	1	7	8	91
Kepanjenkidul	1	7	7	104	1	7	9	104	1	7	9	104
Kota Blitar	3	21	21	317	3	21	28	313	3	21	28	313

Sumber : BKKBN – Laporan Statistik Rutin

3.9 Kampung Keluarga Berencana

Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, Kampung KB terus tumbuh pesat. Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh Nusantara telah menghasilkan ratusan Kampung KB.

Ada beberapa hal yang melatar belaknginya, yaitu : (1) Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru, (2) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, (3) penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat, (4) mewujudkan cita- cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” serta Agenda Prioritas ke 5, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia", (5) mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 – 2030.

Secara umum, tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

Pada dasarnya ada tiga hal pokok yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam suatu wilayah, yaitu : tersedianya

data kependudukan yang akurat, dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah, dan partisipasi aktif masyarakat

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah Pembangunan Keluarga juga harus mendapatkan perhatian. Karena itu, dalam rangka penguatan program KKBPK tahun 2015-2019, BKKBN diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka untuk menjawab tantangan tersebut digagaslah program Kampung KB. Melalui wadah Kampung KB ini nantinya diharapkan pelaksanaan program KKBPK dan program-program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terpadu dan bersamaan. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pembangunan terutama agenda prioritas ke 3 yaitu "Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan".

Oleh karena itu cukup beralasan apabila pembangunan kependudukan dimulai dari wilayah- wilayah pinggiran yaitu kampung. Karena kampung merupakan cikal bakal terbentuknya desa, dan apabila pembangunan pada seluruh kampung maju, maka desapun akan maju. Dan apabila seluruh desa majumaka sudah barang tentu negarapun akan menjadi maju.

3.10 Kampung KB Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat

Walaupun pembentukan Kampung KB diamanatkan kepada BkkbN, akan tetapi pada prinsipnya Kampung KB merupakan perwujudan dari sinergi antara beberapa kementerian terkait dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta tidak ketinggalan partisipasi langsung masyarakat setempat. Oleh sebab itu Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur atau gambaran (potret) dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Hal ini sesuai dengan definisi dari Kampung KB itu sendiri yaitu "satuan wilayah kelurahan yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan Program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis".

Jadi Kampung KB sebenarnya dirancang sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program KKBPK guna mendekatkan akses

pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan dan mengaplikasikan 8 (delapan) fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya.

Sehingga wadah Kampung KB ini dapat kita jadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, perilaku dan cara berpikir (mindset) masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan kampung-kampung lainnya, masyarakat yang tadinya tidak memiliki kegiatan dapat bergabung dengan poktan-poktan yang ada, keluarga yang tadinya tidak memiliki usaha dapat bergabung menjadi anggota UPPKA yang ada.

Tabel 3.33
Jumlah Kampung KB Kota Blitar Tahun 2021 – 2022

Kecamatan	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Total Kelurahan	Kel. yang telah mencanangkan	Jumlah Kampung KB	Total Kelurahan	Kel. yang telah mencanangkan	Jumlah Kampung KB
Sananwetan	7	2	2	7	1	3
Sukorejo	7	3	3	7	1	4
Kepanjenkidul	7	1	1	7	2	3
Kota Blitar	21	6	6	21	4	10

Sumber: Aplikasi Kampung KB BKKBN

Jumlah Kampung KB di Kota Blitar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami perubahan, yaitu berjumlah 6 kampung KB pada tahun 2021, menjadi 10 kampung KB pada tahun 2022.

3.11 Sekolah Siaga Kependudukan

Pendidikan Kependudukan adalah masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan (kelahiran, kematian, perpindahan serta kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan lingkungan hidup sehingga mereka memiliki perilaku yang bertanggungjawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.

Sekolah Siaga Kependudukan merupakan sekolah yang mengintegrasikan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran atau muatan lokal khusus kependudukan di mana di dalamnya terdapat pojok kependudukan (*population corner*) sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan Generasi Berencana (GenRe).

Tabel 3.34
Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan
Kota Blitar Tahun 2022

No	Kota Blitar	Sekolah Siaga Kependudukan
1	Tahun 2022	3

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Tren capaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Blitar relatif stagnan dan masih di dibawah angka 1 (satu). Hal ini menunjukkan bahwa Program Pengendalian Penduduk di Kota Blitar relatif berhasil.
- b. Pada tahun 2022 capaian Usia Kawin Pertama (UKP) di bawah umur 20 tahun mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian Usia Kawin Pertama (UKP) di tahun 2021. Capaian UKP di tahun 2021 yaitu 104 dan pada tahun 2022 yaitu 101. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan di Kota Blitar sudah menampakkan hasil yang positif. Namun demikian pemerintah Kota Blitar tidak boleh lengah, Pemerintah Kota Blitar harus tetap mengencangkan sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan agar di tahun-tahun berikutnya jumlah pernikahan di bawah umur 20 tahun semakin mengecil.
- c. Pasangan Usia Subur (PUS) menggunakan KB suntik masih tinggi, meskipun sudah diberikan KIE tentang dampak positif dan negatif masing-masing alat kontrasepsi, namun tetap saja memilih suntik karena akseptor merasa suntik lebih praktis dan tidak perlu memasukan alat kontrasepsi dalam tubuh.
- d. Pada kegiatan Tri Bina, kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dari tahun 2021 berjumlah 77 kelompok dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 79 kelompok, sedangkan jumlah anggota kelompoknya mengalami penurunan yaitu 3.031 di tahun 2021 menjadi 851 di tahun 2022. Untuk Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) jumlah kelompoknya menurun menjadi 29 kelompok pada tahun 2022, jumlah anggotanya mengalami juga mengalami penurunan dari 1.238 di tahun 2021 menjadi 455 di tahun 2022. Sedangkan untuk kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) jumlah kelompoknya mengalami peningkatan menjadi 45 kelompok pada tahun 2022 setelah sebelumnya pada tahun 2021 berjumlah 44 kelompok. Ini menunjukkan kegiatan Tri Bina, yaitu Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Balita (BKB), dan kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) jumlah anggotanya mengalami penurunan. Untuk meningkatkan jumlah anggota kelompok BKB, BKR, dan BKL ada beberapa usaha yang harus kita lakukan, usaha-usaha tersebut diantaranya adalah meningkatkan pembinaan baik melalui KIE pada masyarakat maupun pendekatan pada tokoh agama/masyarakat tentang pentingnya ikut dalam kegiatan kelompok BKB dan BKL, selain itu dalam meningkatkan anggota kelompok BKR dengan memberikan sosialisasi pentingnya *parenting* kepada orangtua yang memiliki remaja, sehingga keluarga yang memiliki balita, remaja, dan lansia menyadari manfaat mengikuti kegiatan tersebut. Usaha yang berikutnya adalah meningkatkan pelayanan dari pihak penyelenggara kegiatan

BKB, BKR, dan BKL agar keluarga balita, remaja, dan keluarga lansia tertarik untuk mengikuti kegiatan BKB, BKR, dan BKL yang pada akhirnya bisa meningkatkan jumlah anggota kelompok BKB, BKR, dan BKL.

- e. Jumlah Kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Kota Blitar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 masih stagnan secara kuantitas yaitu 34 kelompok, tetapi jumlah anggota kelompok pada tahun 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 331 pada tahun 2022 dan 646 pada tahun 2021. Dengan adanya penurunan jumlah anggota kelompok UPPKA, pembinaan keanggotaan dan peningkatan kualitas kelompok harus tetap dilakukan agar kelompok-kelompok UPPKA di Kota Blitar bisa lebih meningkatkan kualitas kelompoknya yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan jumlah anggota kelompok UPPKA.
- f. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) secara kuantitas sejumlah 28 orang dan Sub PPKBK sejumlah 313 orang. PPKBK dan Sub di Kota Blitar diberikan insentif. Untuk PPKBK diberikan sebesar Rp.100.000, per bulan sedang untuk Sub diberikan Rp.50.000 perbulan. PPKBK adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/ mengelola program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat desa atau kelurahan, sedangkan Sub PPKBK adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan / mengelola program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat dusun/RW

4.2 Saran

- a. Optimalisasi peran PPKBK dan Sub PPKBK serta Penyuluh KB (PKB) sebagai institusi lini lapangan dalam mensukseskan implementasi Program KKBPK di lapangan.
- b. Perlunya kerjasama yang berkesinambungan dari seluruh sektor untuk memajukan program KKBPK.
- c. Dalam pelaksanaan penyusunan profil ini masih diperlukan penyempurnaan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.